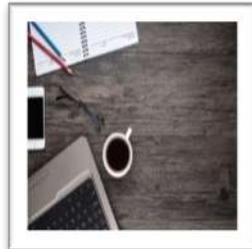


# RENSTRA

Rencana Strategis



**POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**

Alamat: Sedadap, Gang Limau, Nunukan Selatan Kab. Nunukan

---

**Lembar Identitas dan Pengesahan**

- 1. Nama Politeknik** : Politeknik Negeri Nunukan
- 2. Pengarah** : Direktur  
Nama : Arkas Viddy, Ph.D  
Alamat : Sedadap, Gang Limau, Nunukan Selatan Kab.  
Nunukan
- 3. Penanggung Jawab** : Wakil Ditektur Bidang Non Akademik  
Nama :  
Alamat : Sedadap, Gang Limau, Nunukan Selatan Kab.  
Nunukan

Nunukan, 11 Oktober 2022  
Penanggung Jawab  
Direktur



Arkas Viddy, Ph.D  
Nip. 19660508 199203 1 001

## Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Politeknik Negeri Nunukan (PNN) Tahun 2020 – 2024. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan PNN 2020 – 2024 merupakan dokumen pengembangan PNN dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yang memuat tahapan-tahapan capaian yang akan dilakukan PNN untuk menyongsong pencapaian Visi PNN menjadi Pendidikan Tinggi Vokasi Unggul dan Luar Biasa di Kalimantan 2024. Pada masing-masing tahapan memuat suatu slogan capaian dan target-target besar capaian yang menjadi indikator utama.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan PNN 2020-2024 pada akhirnya menjadi sebuah acuan utama PNN selama kurun waktu 5 tahun ke depan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Program-program kerja tahunan. Semoga PNN menjadi sebuah perguruan tinggi yang mampu memberi kontribusi sangat signifikan bagi peningkatan daya saing bangsa di era global.

Tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini merupakan usaha sinergis dari berbagai pihak, terutama Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, wakil direktur bidang akademik dan non akademik, ketua jurusan, dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Politeknik Negeri Nunukan ini.

Nunukan, 04 Juli 2022

Direktur,

A stylized signature in blue and yellow ink, positioned over a circular logo of Politeknik Negeri Nunukan (PNN). The logo features a blue circle with a white stylized 'P' and 'N' inside, and the text 'POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN' around the bottom edge.

Arkas Viddy, Ph.D

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB 1 Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Metode Perencanaan Strategis .....	5
1.5 Azas dan Tata Nilai (Value) PNN.....	14
1.6. Analisis Internal dan Eksternal ( Analisis SWOT).....	17
BAB 2 Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, dan Indikator Tujuan .....	27
2.1 Visi dan Misi .....	27
2.2 Sasaran Strategis .....	30
BAB 3 Isu Strategis, Kondisi Dan Faktor-Faktor Keberhasilan .....	46
3.1. Isu-isu Strategis .....	46
3.2. Kondisi Saat ini .....	49
3.2.1 Sumberdaya Manusia.....	49
3.2.2. Sarana Prasarana.....	50
BAB 4 Arah Dan Strategi Pengembangan Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020-2024 .....	52
4.1. Arah Kebijakan.....	55
4.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.....	55
4.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Nunukan.....	63
4.2. Strategi pengembangan .....	67
4.3. Tata Kelola .....	69
4.4. Reformasi Birokrasi .....	76
4.3.1 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Reformasi Birokrasi PNN .....	79

4.3.2 Target Kinerja Reformasi Birokrasi PNN .....	80
BAB 5 Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan .....	84
5.1 Target Kinerja .....	84
5.2 Kerangka Pendanaan.....	97
5.3 Proyeksi Pendapatan .....	97
5.4 Proyeksi Belanja .....	100
BAB 6 Penutup .....	102
6.1 Pedoman Transisi .....	102
6.2 Kaidah Pelaksanaan .....	103
LAMPIRAN .....	105

## Daftar Tabel

Tabel 1. Keterkaitan Misi, Sasaran, Tujuan strategis dan Indikator Tujuan.....	34
Tabel 2. Keterkaitan Tujuan Strategis, Indikator Tujuan, dan Indikator Kinerja.....	36
Tabel 3. Data Dosen Pendukung Penyelenggaraan Program.....	49
Tabel 4. Data Pendukung Tenaga Administrasi dan Penunjang ..	49
Tabel 5. Sarana Dan Prasarana Politeknik Negeri Nunukan.....	50
Tabel 6. Prioritas Pembangunan Reformasi Birokrasi .....	80
Tabel 7. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih 2020-2024 .....	80
Tabel 8. Pembangunan Reformasi Birokrasi PNN .....	81
Tabel 9. Indikator Tujuan Politeknik Negeri Nunukan.....	85
Tabel 10. Sinkronisasi Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja ...	87
Tabel 11. Proyeksi Penerimaan.....	99
Tabel 12. Proyeksi Belanja .....	101

**BAB**

# 1

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan bangsa. Melalui fungsi transformasi sumber daya manusia, Iptek dan sosial, perguruan tinggi menempati posisi yang strategis dalam perubahan masyarakat. Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar dengan akan diberlakukannya era perdagangan bebas dan era globalisasi. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai dampak dari kebutuhan hidup, pembangunan dan globalisasi menuntut penyelesaian yang sistematis dan terus menerus dalam menjawab tantangan kebutuhan jenis dan kualitas sumberdaya manusia. Dalam era globalisasi, pendidikan tinggi akan mengalami kecenderungan perkembangan yang amat cepat dan dinamis sebagai konsekuensi dinamika peluang dan tantangan yang harus dihadapi baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu perguruan tinggi, termasuk Politeknik Negeri Nunukan harus mampu menjawab tantangan masa depan tersebut dengan melaksanakan tugas, fungsi dan peran sebaik-baiknya khusus peningkatan kualitas SDM lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bangsa.

Untuk peningkatan daya saing bangsa perlu dilakukan tindak lanjut pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan lembaga terkait dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan berbagai jenis lembaga pendidikan yang

tersebar di seluruh Indonesia, termasuk lembaga pendidikan Politeknik yang merupakan pelapor pendidikan jenis vokasi. Untuk implementasi kegiatannya semua lembaga pendidikan tinggi tersebut haruslah merumuskan rencana kegiatan Strategisnya yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Politeknik terstruktur dalam kurun waktu sepuluh tahun, demikian pula halnya Politeknik Negeri Nunukan.

Penyusunan Renstra ini dimaksud sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik Negeri lima tahun ke depan. Renstra ini bukanlah merupakan pedoman yang statis, melainkan dinamis. Dengan maksud Renstra dapat ditinjau ulang secara periodik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Peninjauan Renstra juga dapat dilakukan sesuai dengan perubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik.

Namun demikian, Renstra ini tidak berarti sekedar sebuah dokumen, apalagi sekedar untuk memenuhi kepentingan sangat praktis, misalnya sebagai kelengkapan administrasi untuk akreditasi. Renstra ini disusun berdasarkan kesadaran, kehendak dan kebutuhan bersama untuk dijadikan sebuah pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik, agar setiap keputusan diambil dan setiap langkah yang di tempuh oleh setiap unsur pada setiap level merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Sebagai pedoman penyelenggara Politeknik. Oleh karena itu dokumen Renstra ini disahkan oleh senat Politeknik yang merupakan representasi dari unsur-unsur penyelenggaraan Politeknik.

Sebagai pendoman penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik, Renstra ini perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih bersifat oprasional. Dokumen perencanaan oprasional yang di maksud adalah Renstra tingkat unit kerja dan

Renja Tahunan ( dapat dalam bentuk RKA-KL) per bidang di tingkat unit-unit kerja, dan berbagai peraturan penyelenggaraan Politeknik.

Untuk mengelola pengembangan program studi dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, laju perubahan cepat, tuntutan masyarakat yang lebih maju, kehidupan yang sangat di pengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,serta globalisasi pada umumnya, dirasakan perlunya perencanaan strategis. Perencanaan strategis pada hakekatnya adalah satu kerangka kerja yang berorientasi pada penanggulangan isu, sehingga rencana kerja disusun berdasarkan isu pokok. Isu tersebut dijabarkan dari kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal mengindikasikan adanya kemungkinan kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal mengindikasikan kemungkinan peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

Oleh karena itu dalam proses penyusunan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Perencanaan strategis Politeknik Negeri Nunukan merupakan perencanaan jangka panjang (10 tahunan), berorientasi kedepan, penetapan tujuan dan penyusunan strategis secara eksplisit, yang memetakan alur kegiatan saat ini dengan gambaran masa depan yang diinginkan dengan mendasarkan pada pertimbangan matang akan kemampuan organisasi dan kecenderungan perubahan lingkungan.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 dan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Peraturan pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 42 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kelola Politeknik Negeri Nunukan
10. Sistem Informasi Data dan Kinerja (Sidakin) oleh Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Politeknik Negeri Nunukan dimaksudkan untuk:

1. Pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di PNN yang berisi pernyataan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
2. Salah satu wujud akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan mutu kepada para pemangku kepentingan; dan
3. Pedoman perencanaan operasional untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan institusi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis PNN 2020-2024 adalah untuk:

1. Menjamin kesinambungan dan keajegan kegiatan/program menuju pencapaian tujuan institusi;
2. Menyiapkan suatu kerangka kerja yang menuntut bagi pertumbuhan dan pengembangan program studi.
3. Menyiapkan strategi bagi pengalokasian sumberdaya.
4. mengendalikan kesinambungan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di PNN dari satu periode ke periode berikutnya demi tercapainya visi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **1.4. Metode Perencanaan Strategis**

Renstra Perubahan PNN Tahun 2020-2024 ini disusun dengan metode partisipatif yang melibatkan seluruh *stakeholder* PNN. Perencanaan diawali dengan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT/KKPA) PNN. Hasil analisis SWOT digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra, yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan pencapaiannya. Strategi implementasi Renstra Perubahan PNN 2020-2024 dijalankan melalui penyusunan program, kegiatan, anggaran, dan kerangka implementasi (sinkronisasi koordinasi, dan tata kelola; distribusi urusan berdasar kegiatan; sistem pengawasan internal; dan mekanisme dan instrumen pemantauan/evaluasi).

#### **1.5. Sejarah Berdiri dan Perkembangan PNN**

Ide dan gagasan berdirinya Politeknik Negeri Nunukan diawali dengan keprihatinan para tokoh masyarakat Kabupaten Nunukan dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang ditandainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan yang terendah dibandingkan dengan 4 kabupaten/kota lainnya yang berada di Kalimantan Utara dan hanya kurang lebih 30 persen lulusan SMK/SMA yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi,

sedangkan sisanya menjadi buruh kasar dan buruh perkebunan di negeri jiran Malaysia (Sabah).

Hal ini tentu saja sangat berdampak pada tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Nunukan, padahal di satu sisi Kabupaten Nunukan yang pada saat itu masih merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu penyumbang PDRB tertinggi di Indonesia dan tentu saja hal ini sangat ironis serta memprihatinkan. Disisi lain, Kabupaten Nunukan sendiri berada di wilayah perbatasan langsung antara Indonesia-Malaysia yang justru mempertontonkan kondisi kontras dimana Malaysia (Sabah) memperlihatkan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan sebaliknya Indonesia (Kabupaten Nunukan) memperlihatkan potret masyarakat yang didominasi masyarakat berpenghasilan rendah.

Faktor inilah yang mendorong masyarakat dan tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama bersama unsur pemerintahan Kabupaten Nunukan bertekad untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut berbagai hal telah dilakukan pendiri dan pengagas tersebut sejak tahun tahun 2008 antara lain, membentuk tim kerja, membentuk yayasan, melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat dan Kementerian pendidikan dan kebudayaan, mencari bentuk perguruan tinggi, membuat Peraturan Daerah, membebaskan dan menyiapkan lahan kampus, pembangunan gedung perkuliahan, pengadaan sarana dan prasarana perkuliahan, pengurusan sertifikat lahan dan lain-lain.

Pendiri dan Pengagas merupakan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pihak pemerintah Kabupaten Nunukan antara lain:

1. H. Hafid (Bupati Nunukan)
2. Drs. Zainuddin, MSi (Sekretaris Daerah)
3. Dra. Asmah Gani
4. Trisno Hadi, S.KM, MSi

5. Drs. Sabaruddin, MSi
6. dr. Rustam
7. Gozali, SE, MH
8. Ustaz Herman
9. Ir. Faridil Murad, SE, MT
10. Ir. Zainuddin Palantara
11. H. Jafar, SE
12. Drs. Abdul Karim, MSi
13. Drs. Safaruddin, MSi
14. Ir. Helmy

Pendiri dan pengagas tersebut berusaha melakukan pendekatan keberbagai pihak, baik itu pemerintah pusat dalam hal kementerian pendidikan dan kebudayaan maupun pendekatan ke beberapa universitas seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Mulawarman, ITS dan Politeknik Negeri Samarinda.

Langkah selanjutnya pemerintah Kabupaten Nunukan membentuk sebuah yayasan pendidikan yaitu yayasan **PENEKINDI DEBAYA** yang berarti Maju Bersama-Sama yang dengan keanggotaan sebagai berikut:

1. Trisno Hadi, S.KM, MSi (Ketua)
2. Ario, SE (Bendahara)
3. Gozali, SE, MH (Sekretaris)

### **Perjuangan Pendirian PDD Politeknik Negeri Nunukan**

Setelah terbentuknya yayasan tersebut, maka perencanaan intens pendirian perguruan tinggi tersebut dilaksanakan dan tentunya dengan selalu berkonsultasi dengan pihak pemerintah Kabupaten yang saat itu Bupati adalah H. Hafid dan Sekretaris daerahnya Drs. Zainuddin, MSi (Alm). Dari hasil pemikiran bersama antara para tokoh, yayasan Penekindi Debaya dan pemerintah Kabupaten Nunukan maka muncullah nama **UNIVERSITAS PERSADA PERBATASAN** yang dianggap cocok didirikan di

Kabupaten Nunukan karen Nunukan berada di perbatasan antara Indonesia-Malaysia.

Untuk mewujudkan terbentuknya Universitas Persada Perbatasan tersebut maka, maka pihak yayasan Penekindi Debaya meminta arahan dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Mulawarman, dan mendapat arahan jurusan yang prospek di Nunukan antara lain perikanan ataupun pertanian karena ini merupakan hasil utama Kabupaten Nunukan. Kemudian direncanakan jurusan ini merupakan salah satu jurusan unggulan nantinya kalau Universitas Persada Perbatasan berdiri.

Selanjutnya yayasan tersebut minta arahan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan yang ternyata arahan yang diterima bahwa pemerintah telah melakukan moratorium untuk mendirikan universitas, dan diarahkan untuk mendirikan Politeknik mengingat arah kebijakan pemerintah saat ini mengembangkan pendidikan vokasi karena lulusan Politeknik merupakan lulusan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri, sehingga lulusan Politeknik langsung diterima bekerja di perusahaan dan sekaligus mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Nunukan diarahkan untuk bekerjasama dengan Politeknik Negeri Samarinda, dan agar Politeknik Negeri Samarinda bersedia menjadi konsultan pendirian Politeknik di Nunukan.

Selanjutnya pada tahun 2010 ditandatangani kontrak kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nunukan yang pada saat itu H. Hafid sebagai Bupati Nunukan dan Riswan Asmaran, ST, MM (Alm) sebagai Direktur Politeknik Negeri Samarinda. Menindaklanjuti kerjasama tersebut, maka Politeknik Negeri Samarinda membentuk Tim Kerja yang keanggotaannya sebagai berikut:

1. Riswan Asmaran, ST, MM (Pengarah)
2. Didi Budi Susilo, ST, M.Eng (Ketua)
3. Amiruddin, SE, MM (Anggota)

Pada tahun yang sama maka Yayasan Penekindi Debaya yang dimotori oleh Trisno Hadi, S.KM., MSi mengusulkan ke Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Pendanaan bagi berdiri dan operasional Pendidikan Politeknik. Pada tahun 2011 maka terbitlah Peraturan Daerah Tahun 2011 tentang bantuan untuk Politeknik Nunukan. Dengan dasar Perda tersebut, maka telah dibebaskan kurang lebih 10 ha lahan kampus dan pada tahun 2012 dimulai pembangunan gedung perkuliahan Politeknik.

Namun pada tahun 2012 tersebut terjadi pergantian kepemimpinan di Politeknik Negeri Samarinda, yakni Direktur sebelumnya yaitu Riswan Asmaran, ST, MM digantikan oleh Ir. H. Ibayasid, M.Sc, demikian pula di Kabupaten Nunukan, Bupati sebelumnya yakni H. Hafid digantikan oleh H. Basri. Dari perubahan kepemimpinan tersebut, maka terjadi perubahan tim kerja, baik yang ada di Kabupaten Nunukan, maupun yang ada di Politeknik Negeri Samarinda, sementara pekerjaan studi kelayakan maupun naskah akademik yang dikerjakan Tim Konsultan Politeknik yang dimotori oleh Didi Budi Susilo belum sempat terselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Nunukan membentuk Tim Percepatan Pendirian Politeknik yang terdiri dari beberapa orang antara lain:

1. Drs. H. Basri (Pembina)
2. Dra. Asmah Gani (Pembina)
3. Drs. Tommy Harun, MSi (Ketua)
4. Trisno Hadi, S.KM, MSi (Anggota)
5. Drs. Sabarudin, MSi (Anggota)
6. dr. Rustam (Anggota)
7. Gozali, SE, MH (Anggota)

Selain itu Pemerintah Kabupaten Nunukan juga mengajak ITS untuk mengkonsultani pendirian Politeknik Nunukan ini, namun keikutsertaan ITS ini tidak bertahan lama dan tidak sampai selesai

karena permasalahan pendanaan dan biaya operasional, dan tetap dilanjutkan oleh Tim Kerja Politeknik Negeri Nunukan.

Politeknik Negeri Nunukan melakukan reorganisasi tim kerjanya menjadi Tim Percepatan yaitu:

1. Ir. H. Ibayasid, MSc (Pembina)
2. Arkas Viddy, SE, MM, PhD (Ketua)
3. Dr. Rafiqoh, SE, MM (Anggota)
4. Syachrul, SE, MM (Anggota)

Pada tahun 2013, barulah Tim Percepatan Politeknik Negeri Samarinda mulai melakukan survey dan studi kelayakan dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 3(tiga) bulan. Pada sekitar bulan Agustus 2013 menteri pendidikan nasional pada saat itu yaitu Prof. Dr. M. Nuh sempat berkunjung ke Sebatik Kabupaten Nunukan dan sebenarnya tidak ada tujuan lain. Namun atas hasil konsultasi dengan Bupati Nunukan, maka Ketua Tim Percepatan Politeknik Negeri Samarinda dan Ketua Yayasan Penekindi Debaya mengatur agar Pak Menteri tersebut diarahkan untuk dapat mengunjungi dan melihat progress pembangunan kampus Politeknik Nunukan yang pada saat itu progressnya sudah mencapai 80 persen. Melihat kesiapan gedung tersebut, maka Menteri sempat menanyakan kapan kesiapan Nunukan untuk menjalankan perkuliahan Politeknik Nunukan. Menteri sempat menawarkan tahun 2014 sebagai tahun dimulainya perkuliahan tersebut, dan Bupati pun dengan tegas menjawab siap. Pada hari yang sama diserahkanlah semua dokumen kelengkapan pendirian Politeknik Nunukan di Sebatik. Pada waktu penyerahan dokumen tersebut Bapak Menteri masih sempat menawarkan untuk didirikan Akademi Komunitas di Sebatik, namun pemerintah Kabupaten Nunukan tetap menginginkan Politeknik yang didirikan di Nunukan.

Pada bulan September 2013 proposal yang dilengkapi dengan Studi Kelayakan, Naskah Akademik dan persyaratan lainnya dan diterima bagian kelembagaan yang bernama Ibu Istri. Sementara

dokumen kelengkapan diproses bagian kelembagaan Tim Percepatan yang dilaksanakan oleh Arkas Viddy dan Rafiqoh melakukan pendekatan melalui jalur *top down* yakni melalui Bapak Menteri Pendidikan Nasional, karena pada saat di Sebatik beliau sudah berjanji untuk menerima presentasi tim percepatan langsung ke Menteri Pendidikan Nasional, sehingga Tim Percepatan tidak menyia-nyaiakan peluang ini.

Kenyataannya tidak mudah untuk melakukan presentasi langsung ke Menteri bahkan penentuan jadwal untuk ketemu beliau pun mengalami beberapa kali penundaan, sementara Tim Percepatan telah berusaha keras datang dimanakan Bapak Menteri berada. Karena kepadatan jadwal Menteri Pendidikan Nasional, maka urusan pendirian Politeknik Nunukan diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi yang pada saat itu dijabat oleh Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Eng.

Tim Percepatan Politeknik Negeri Samarinda melakukan gerak cepat dengan meminta jadwal presentasi Tim Percepatan Nunukan dan Politeknik Negeri Samarinda kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Setelah itu Tim Percepatan mempersiapkan semua bahan presentasi yang akan dipresentasikan oleh Bupati atau Wakil Bupati Nunukan di depan Direktorat Pendidikan Tinggi.

Pada tanggal            bulan            tahun 2014 merupakan jadwal presentasi Bupati atau Wakil Bupati tersebut, dan yang hadir pada saat itu dari Tim Politeknik Negeri Samarinda adalah:

1. Ir. H. Ibayasid, MSc
2. Arkas Viddy, SE, MM, PhD
3. Dr. Rafiqoh, SE, MM

Sedangkan dari Tim Percepatan Kabupaten Nunukan adalah:

1. Dra. Asma Gani (Wakil Bupati saat itu)
2. Trisno Hadi, S. Km, MSi
3. Drs. Sabarudin, MSi

Tim Percepatan Politeknik Negeri Samarinda yang datang terlebih dahulu untuk menemui Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi di Gedung D Lantai 12, dan pada pertemuan sebelum presentasi tersebut Tim Percepatan sempat menjelaskan bahwa alasan paling esensial didirikannya Politeknik Nunukan, karena hanya 30 persen lulusan SMK/SMA yang mampu kuliah keluar Nunukan, sebanyak 70 persen lulusan SMK/SMA Nunukan yang tidak mampu kuliah karena di luar kota, dan mereka merantau ke Malaysia untuk bekerja menjadi buruh kasar dan buruh perkebunan. Bapak Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Eng sangat terharu dan sedih mendengar cerita ini dan langsung menyatakan kesetujuan untuk pendirian Politeknik Negeri Nunukan bahkan sempat menawarkan jenjang S1 atau D3 yang diinginkan dan Ir. Ibayasid, MSc selaku Direktur dan sekaligus Pembina menyampaikan lebih baik dimulai dengan D3 dulu.

Tim Percepatan mempertanyakan dasar hukum yang digunakan menggunakan Yayasan atau apa, mengingat ini baru tahap pengusulan. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi justru menyatakan bahwa dapat digunakan UU Program Studi Diluar Kampus Utama (PDD) sehingga tidak perlu menggunakan yayasan, tapi masih terhitung program studi dari Politeknik Pembina yaitu Politeknik Negeri Samarinda.

Selang beberapa waktu kemudian tibalah rombongan dari Tim Percepatan Pendirian Politeknik yang diketuai oleh ibu Asma Gani untuk melakukan presentasi. Sungguh merupakan suatu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhana Wataala, pada saat ibu Wakil Bupati tersebut ingin melakukan presentasi Bapak Dirjen langsung mengatakan usulan sudah diterima dan tidak perlu melakukan presentasi lagi.

Pada bulan Juni 2014, Surat Mandat pembukaan Program Studi Diluar Domisili (PDD) Politeknik Negeri Samarinda rintisan Politeknik Negeri Nunukan diterima dan bisa dilaksanakan

penerimaan mahasiswa baru dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan. Hal ini tentu merupakan permasalahan tersendiri, mengingat masa penganggaran di Kabupaten Nunukan sudah lewat sejak Desember tahun lalu, sehingga Pemerintah Kabupaten tidak mempunyai alokasi anggaran pada tahun 2014. Namun dengan kerja keras tim percepatan dan semangat yang luar biasa, maka penerimaan mahasiswa baru bisa dimulai pada saat itu.

Peresmian Politeknik Negeri Nunukan dilakukan dengan bersamaan diterimanya SK Pembukaan Program Studi yaitu:

1. Teknologi Hasil Perikanan;
2. Teknik Alat Berat;
3. Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan;
4. Administrasi Bisnis.

Proses peresmian juga merupakan sejarah yang tak terlupakan dimana pada tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 8 Oktober 2014, Dirjen Dikti akan meresmikan PDD Politeknik Negeri Nunukan dan hanya ingin di Nunukan selama 1 (satu) jam setelah itu akan langsung tugas ke Papua, sementara tidak transportasi laut maupun udara bisa pulang pergi seperti itu kecuali disewakan pesawat. Drs. Tommy Harun, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Nunukan dan Arkas Viddy, S.E., M.M., Ph.D. selaku yang dipercayakan sebagai Ketua PDD Politeknik Negeri Nunukan mendiskusikan dengan Bapak Pj. Gubernur Kalimantan Utara saat itu yaitu Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM. Ternyata Bapak Pj. Gubernur bersedia menyewakan pesawat Tarakan-Nunukan pulang pergi, sehingga kegiatan peresmian bisa dilaksanakan.

Peresmian PDD Politeknik Negeri Nunukan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2014 dengan penandatanganan prasasti PDD Politeknik Negeri Nunukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Bapak Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Eng. dihadiri oleh Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M. selaku Pj. Gubernur Kalimantan Utara, Drs. H. Basri, MSi. selaku Bupati

Nunukan, Dra. Asmah Gani, selaku Wakil Bupati Nunukan, Ir. H. Ibayasid, M.Sc. selaku Direktur Politeknik Negeri Samarinda, Kepala Dinas OPD Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas OPD Kabupaten Nunukan, penggagas dan pendiri serta tokoh masyarakat di Kabupaten Nunukan.

Setelah diresmikan, maka diangkat struktur pengelola PDD Politeknik Negeri Nunukan yang pertama sebagai berikut:

1. Arkas Viddy, SE, MM, PhD (Ketua)
2. Drs. Suramli, MM (Wakil Ketua 1)
3. Andi Dewi (Wakil Ketua 2)
4. Syahrir, ST, MT (Ka. Prodi Teknologi Hasil Perikanan)
5. Wajilan, ST, MT (Ka. Prodi Teknik Alat Berat)
6. Tommy Eka Mitra, PhD (Ka. Prodi Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan)
7. Dr. M. Kiswanto, SE, MSi (Ka. Prodi Administrasi Bisnis)

Jumlah pendaftar pertama adalah mencapai 657 pendaftar dan diterima sebanyak 300 mahasiswa atau 10 (sepuluh) kelas dengan rincian sebagai berikut:

1. Teknologi Hasil Perikanan sebanyak 1 kelas
2. Teknik Alat Berat sebanyak 2 kelas
3. Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan 3 kelas
4. Administrasi Bisnis 4 kelas

Setelah proses pendirian selesai selanjutnya dilakukan persiapan kemandirian, maka seluruh civitas akademika berkomitmen untuk mempersiapkan dan memperjuangkan kemandirian PDD Politeknik Negeri Nunukan dengan menandatangani spanduk komitmen dan ditempel pada dinding depan kampus.

### **1.5 Azas dan Tata Nilai (Value) PNN**

Dalam upaya melaksanakan pengembangannya, Politeknik Negeri Nunukan mengacu pada azas-azas sebagai berikut:

1. Azas iman dan Taqwa, yaitu sebagai dasar hakiki umat manusia sehingga pertumbuhan ilmu pengetahuan senantiasa dapat menumbuhkan harkat dan martabat manusia serta meningkatkan kesejahteraannya;
2. Azas Otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
3. Azas Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Azas Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
5. Azas peminjaman Mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan yang memenuhi atau melampaui standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;
6. Azas Layanan Prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama para mahasiswa;
7. Azas Akses yang Berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya;
8. Azas Keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya.
9. Azas keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa secara terus-menerus,

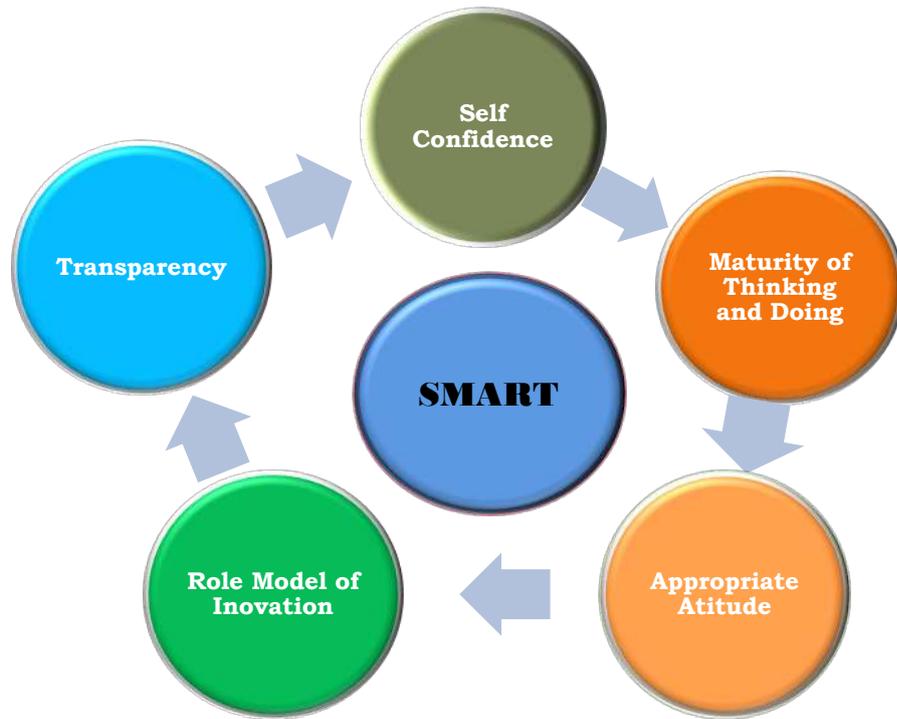
dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan; dan

10. Azas Partisipasi Atas Tanggung jawaban Negara, yaitu keterlibatan Politeknik Negeri Nunukan secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan.

PNN memiliki tata nilai yang merefleksikan identitas dan kecirian lembaga dimana nilai-nilai dipedomani dalam setiap aktivitas PNN, baik itu dilakukan terbatas pada internal PNN, maupun aktivitas yang melibatkan pihak eksternal. Tata nilai PNN ini terdiri dari Percaya Diri (*Self Confidence*), Kedewasaan Berfikir dan Bertindak (*Maturity of Thinking and Doing*), Berperilaku Baik (*Appropriate Attitude*), Menjadi Keteladanan atau Percontohan dalam Pembaharuan (*Role Model of Inovation*), dan Azas Keterbukaan (*Transparency*) atau disingkat SMART. Pernyataan tata nilai ini juga terdapat pada Statuta PNN sebagai norma akademik yang dianggap sebagai pedoman utama penyelenggaraan aktivitas akademik pendidikan vokasi PNN. Adapun tata nilai tersebut dapat digambarkan pada Gambar 1.2.

Penjelasan dari masing-masing tata nilai tersebut dapat dilihat pada bagian berikut:

- S** – *Self Confidence*; yang bermakna percaya dalam setiap aktivitas;
- M** – *Maturity of Thinking and Doing*; yang bermakna dewasa dalam berfikir dan bertindak;
- A** – *Appropriate Attitude*; yang bermakna berperilaku baik dan diterima;
- R** – *Role Model of Inovation*; yang bermakna menjadi contoh dalam berinovasi;
- T** – *Transparency*; yang bermakna menganut azas keterbukaan pengelolaan.



**Gambar 1.2. Tata Nilai**

### 1.6. Analisis Internal dan Eksternal ( Analisis SWOT)

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

#### 1. Kekuatan ( Strength)

No	Kekuatan	Bobot	Skor	B x S
1	Indikator Capaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi	0.05	8	0.4
2	Dosen Berkualifikasi S2	0.1	9	0.9
3	Team Work Dosen	0.2	9	1.8
4	Komitmen Kuat Sivitas	0.1	9	0.9
5	Struktur Institusi Yang jelas	0.05	8	0.4
6	Audit Internal Institusi secara Berkala	0.05	7	0.35
7	Perubahan Status Negeri	0.1	9	0.9
8	Proses Monitoring dosen	0.1	7	0.7

No	Kekuatan	Bobot	Skor	B x S
	secara konsisten			
9	Kompetensi dosen sesuai bidangnya	0.2	7	1.4
10	Dosen aktif dalam kegiatan penelitian	0.05	7	0.35
		1.00	80.00	8.10

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 2 unsur yang dianggap paling penting yaitu Team Work Dosen dan Kompetensi dosen sesuai bidangnya, sedangkan unsur yang dianggap paling kuat adalah Dosen Berkualifikasi S2, Team Work Dosen, Komitmen Kuat Sivitas, dan Perubahan Status Negeri. Dari hasil perkalian antara bobot dan skor maka diperoleh nilai 8.10.

## 2. Kelemahan (Weaknesses)

No	Kelemahan	Bobot	Skor	B x S
1	Belum terbentuknya sistem informasi terpadu	0.2	8	1.6
2	Sarana dan prasana yang belum memadai	0.2	8	1.6
3	Penerimaan SPP yang masih rendah	0.2	9	1.8
4	Minimnya Kerja sama dengan DUDI dan Instansi terkait	0.1	7	0.7
5	Belum terlaksananya <i>Workshop</i> kurikulum ber KKNi	0.1	8	0.8
6	Belum diterapkannya hasil penelitian dosen di dunia industri	0.05	9	0.45
7	Kurangnya motivasi mahasiswa dalam KBM	0.05	7	0.35
8	Kurangnya Soft Skill Mahasiswa	0.05	7	0.35
9	Penjaringan Mahasiswa yang belum maksimal	0.05	7	0.35
10		1.00	70.00	8.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 3 unsur yang dianggap paling penting yaitu Belum terbentuknya sistem informasi terpadu, Sarana dan prasana yang belum memadai, dan Penerimaan SPP yang masih rendah, sedangkan unsur yang dianggap paling lemah adalah Penerimaan SPP yang masih rendah dan Belum diterapkannya hasil penelitian dosen di dunia industri. Dari hasil perkalian antara bobot dan skor maka diperoleh nilai 8.00.

### 3. Ancaman

No	Ancaman	Bobot	Skor	B x S
1	Kurangnya minat terhadap program D3	0.2	8	1.6
2	Kurang sinkronnya jurusan sekolah menengah vokasi dengan program studi yang ada	0.05	6	0.3
3	Terdapat perguruan tinggi lain di wilayah Kaltara	0.05	6	0.3
4	Perkembangan teknologi informasi dan revolusi industri 5.0	0.2	8	1.6
5	Adaptasi Kondisi Pandemi	0.05	6	0.3
6	Kurangnya jumlah industri di wilayah Kaltara	0.1	8	0.8
7	Berada di daerah perbatasan	0.05	8	0.4
8	Paradigma masyarakat terhadap jurusan yang ada	0.05	8	0.4
9	Minat masyarakat untuk meningkatkan pendidikan	0.1	8	0.8
10	Komunikasi dan dukungan Alumni	0.1	8	0.8
11	UU No 23 Tahun 2012 Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah terutama menyangkut pendidikan	0.05	6	0.3
		<b>1.00</b>	<b>81.00</b>	<b>7.80</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 2 unsur yang dianggap paling penting yaitu Kurangnya minat terhadap program D3 dan Perkembangan teknologi informasi dan revolusi industri 5.0, sedangkan unsur yang dianggap merupakan ancaman terbesar saat ini adalah Kurangnya minat terhadap program D3. Dari hasil perkalian antara bobot dan skor maka diperoleh nilai 8.10.

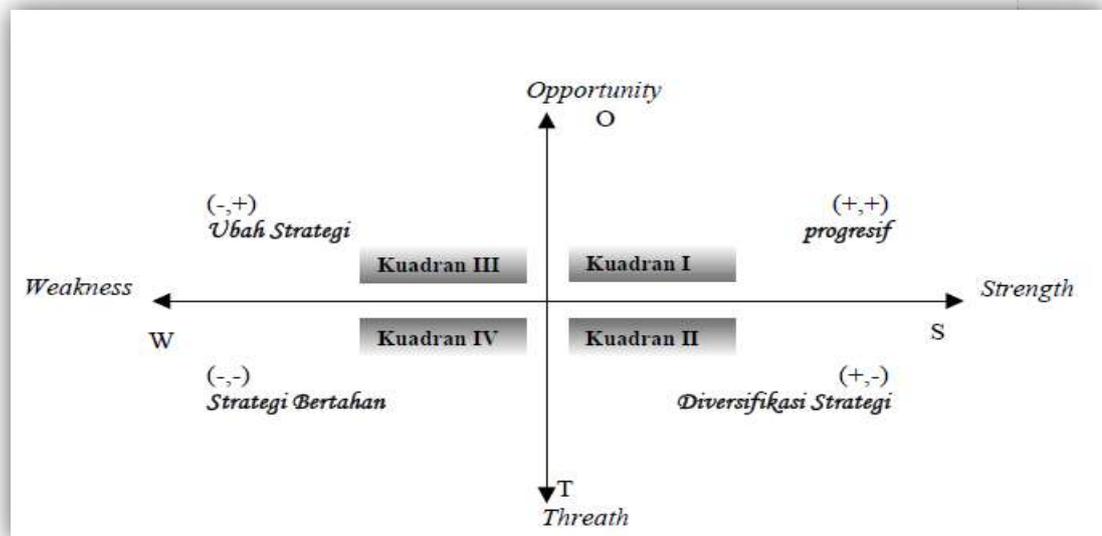
#### 4. Peluang

No	Peluang	Bobot	Skor	B x S
1	PT Vokasi yang berstatus Negeri di perbatasan	0.2	9	1.8
2	Dana CSR dari perusahaan	0.05	6	0.3
3	Ketersediaan Beasiswa Kabupaten dan Provinsi	0.05	7	0.35
4	Kerja sama dengan Lembaga Bahasa Inggris ICEE	0.1	8	0.8
5	Dukungan Pemerintah daerah	0.05	7	0.35
6	Tersedianya peluang kerja sama tri darma dosen dengan DUDI	0.1	7	0.7
7	Banyaknya Jumlah lulusan SMA/SMK per tahun	0.2	9	1.8
8	Keterbatasan pendapatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan keluar Nunukan	0.05	7	0.35
9	Ketersediaan koata KIP kuliah	0.2	8	1.6
		<b>1</b>	<b>68</b>	<b>6.45</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 3 unsur yang dianggap paling penting yaitu PT Vokasi yang berstatus Negeri di perbatasan, Banyaknya Jumlah lulusan SMA/SMK per tahun dan Ketersediaan koata KIP kuliah, sedangkan unsur yang dianggap paling berpeluang saat ini

adalah PT Vokasi yang berstatus Negeri di perbatasan dan Banyaknya Jumlah lulusan SMA/SMK per tahun. Dari hasil perkalian antara bobot dan skor maka diperoleh nilai 6.45.

Dari semua tabel di atas dapat disimpulkan dengan melihat dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal diketahui bahwa nilai kekuatan sebesar 8.10, sedangkan nilai kelemahan sebesar 8.00 yang menunjukkan bahwa kekuatan lebih besar dari kelemahan. Dilihat dari factor eksternal dapat diketahui bahwa nilai ancaman atau tantangan sebesar 7.80, sedangkan nilai peluang sebesar 6.45 yang menunjukkan bahwa ancaman lebih besar daripada peluang. Berdasarkan analisis internal dan eksternal menggunakan diagram kartesius 4 kuadran dan untuk mengetahui strategi apa yang sesuai yang digunakan dapat dilihat pada diagram berikut :



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa posisi kondisi Politeknik Negeri Nunukan pada saat ini berada pada kuadran II (positif, negatif), Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Diversifikasi Strategi**, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya

bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Untuk penerapan analisis internal dan eksternal di atas dengan ketentuan bahwa kekuatan lebih besar daripada kelemahan (+) dan peluang lebih kecil daripada ancaman (-) dan berada pada kuadran II sehingga strategi yang disarankan adalah strategi diversifikasi atau dengan kata lain penambahan produk atau jasa yang dihasilkan. Penambahan produk atau jasa yang dimaksud bisa berupa penambahan program studi (*horizontal diversification product*) dan bisa berupa penambahan jenjang program studi (*vertical diversification product*) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi saat ini

#### **5. Kekuatan (Strenght)**

Adapun kekuatan yang dimiliki dalam pendirian Politeknik Negeri Nunukan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Indikator Capaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi
- b. Dosen Berkualifikasi S2
- c. Team Work Dosen
- d. Komitmen Kuat Sivitas
- e. Struktur Institusi Yang jelas
- f. Audit Internal Institusi secara Berkala
- g. Perubahan Status Negeri
- h. Proses Monitoring dosen secara konsisten
- i. Kompetensi dosen sesuai bidangnya
- j. Dosen aktif dalam kegiatan penelitian.

#### **6. Kelemahan ( Weaknesses)**

Kelemahan yang dapat diidentifikasi dalam Politeknik Negeri Nunukan adalah sebagai berikut;

- a. Belum terbentuknya sistem informasi terpadu;
- b. Sarana dan prasana yang belum memadai;
- c. Penerimaan SPP yang masih rendah
- d. Belum terlaksananya Workshop kurikulum ber KKNI

- e. Belum diterapkannya hasil penelitian dosen di dunia industri
- f. Kurangnya motivasi mahasiswa dalam KBM
- g. Kurangnya Soft Skill Mahasiswa
- h. Penjaringan Mahasiswa yang belum maksimal

## **7. Peluang (Opportunities)**

Peluang yang dapat diidentifikasi dalam pendirian Politeknik Negeri Nunukan adalah sebagai berikut:

- a. PT Vokasi yang berstatus Negeri di perbatasan
- b. Dana CSR dari perusahaan
- c. Ketersediaan Beasiswa Kabupaten dan Provinsi
- d. Kerja sama dengan Lembaga Bahasa Inggris ICEE
- e. Dukungan Pemerintah daerah
- f. Tersedianya peluang kerja sama tri darma dosen dengan DUDI
- g. Banyaknya Jumlah lulusan SMA/SMK per tahun
- h. Keterbatasan pendapatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan keluar Nunukan
- i. Ketersediaan kuota KIP kuliah;

## **8. Ancaman (Threats)**

Ancaman yang dapat diidentifikasi dalam pendirian Politeknik Negeri Nunukan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya minat terhadap program D3
- b. Kurang sinkronnya jurusan sekolah menengah vokasi dengan program studi yang ada
- c. Terdapat perguruan tinggi lain di wilayah Kaltara
- d. Perkembangan teknologi informasi dan revolusi industri 5.0
- e. Adaptasi Kondisi Pandemi
- f. Kurangnya jumlah industri di wilayah Kaltara
- g. Berada di daerah perbatasan
- h. Paradigma masyarakat terhadap jurusan yang ada

- i. Minat masyarakat untuk meningkatkan pendidikan
- j. Komunikasi dan dukungan Alumni
- k. UU No 23 Tahun 2012 Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah terutama menyangkut pendidikan

## **9. Strategi**

Memperhatikan analisis internal dan eksternal dari Kabupaten Nunukan maka pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah Kabupaten Nunukan layak untuk dilakukan melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

### **a. Strategi S-W**

Agar kelemahan dari pendirian Politeknik Negeri Nunukan dapat diatasi dengan kekuatannya, maka diperlukan strategis sebagai berikut;

1. Kuangnya sarana dan prasarana dapat diminimalkan dengan adanya perubahan status;
2. Kelemahan berupa kurangnya pembayaran SPP dapat diminimalkan dengan adanya komitmen kuat sivitas akademika dalam hal mendorong meningkatkan kesadaran pembayaran SPP;
3. Minimnya Kerja sama dengan DUDI dan Instansi terkait dapat diminimalkan dengan adanya Kompetensi dosen sesuai bidangnya dan Dosen aktif dalam kegiatan penelitian.
4. Belum terlaksananya Workshop kurikulum ber KKNI dapat diminimalkan dengan adanya Team Work Dosen
5. Belum diterapkannya hasil penelitian dosen di dunia industri dapat diminimalkan dengan adanya Dosen aktif dalam kegiatan penelitian
6. Kurangnya motivasi mahasiswa dalam KBM dapat diminimalkan dengan adanya Komitmen Kuat Sivitas

### **b. Strategis T-O**

Agar tantangan Politeknik Negeri Nunukan dapat diatasi dengan peluang yang dimiliki, maka diperlukan strategi sebagai berikut;

1. Kurangnya minat terhadap program D3 dapat ditingkatkan dengan tersedianya peluang kerja sama tri darma dosen dengan DUDI;
2. Kurang sinkronnya jurusan sekolah menengah vokasi dengan program studi yang ada dapat diminimalkan dengan tersedianya peluang kerja sama tri darma dosen dengan DUDI;
3. Persaingan dengan perguruan tinggi lain di wilayah Kaltara dapat diatasi dengan jenis pendidikan Vokasi yang berstatus Negeri di perbatasan;
4. Perkembangan teknologi informasi dan revolusi industri 5.0 ada dapat diimbangi dengan adanya kerja sama dengan lembaga Bahasa Inggris ICEE;
5. Kurangnya jumlah industri di wilayah Kaltara dapat ditingkatkan dengan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industri;
6. Paradigma masyarakat terhadap jurusan yang ada dapat diubah dengan tersedianya peluang kerja sama lembaga dengan dunia usaha dan dunia industri.

### **c. Strategis S-O**

Agar peluang dari pendirian Politeknik Negeri Nunukan dapat di raih dengan kekuatan yang di miliki, maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Merintis jejaring perusahaan-perusahaan tambang, perkebunan, pertanian dan perikanan;
2. Menggalang kerjasama dengan berbagai asosiasi dalam hal pengakuan kompetensi.

Agar kelemahan dari pendirian Politeknik Negeri Nunukan dapat di raih dengan peluang yang dimiliki, maka diperlukan strategi sebagai berikut;

1. Membangun sitem yang terstruktur untuk mencapai visi, misi, dan tujuan institusi;
2. Meningkatkan kemampuan/kompetensi lulusan yang profesional.

#### **d. Strategis S-T**

Agar tantangan dari pendidikan Politeknik Negeri Nunukan dapat diantisipasi dengan kekuatan yang dimiliki, maka diperlukan strategi sebagai berikut;

1. Senantiasa memperbaiki dan mengembangkan kualitas penyelenggaraan Politeknik Negeri Nunukan;
2. Menyiapkan lulusan dengan kompetensi yang mempunyai daya saing dan pangsa pasar;
3. Meningkatkan jiwa entrepreneurship.

#### **e. Strategis W-T**

Agar kelemahan dan tantangan dari pendirian Politeknik Negeri Nunukan dapat teratasi, maka diperlukan strategis sebagai berikut;

1. Latihan yang dilakukan problem Solving Oriented;

Meningkatkan frekuensi dan waktu on job training di berbagai perusahaan.

# BAB 2

## Visi, Misi, dan Sasaran, Tujuan, dan Indikator Tujuan

### 2.1 Visi dan Misi

Politeknik Negeri Nunukan merupakan lembaga pendidikan vokasional di bidang teknologi berorientasi pada keahlian dan keilmuan untuk menunjang perkembangan dunia industri dan dunia usaha, sehingga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi-nya dengan visi dan misi sebagai berikut;

#### 1. Visi

Visi Politeknik Negeri Nunukan tercantum dalam Dokumen Statuta PNN (dalam proses pengusulan untuk menjadi Permendikbud) adalah sebagai berikut:

**“Menjadi Pendidikan Tinggi Vokasi Unggul dan Luar Biasa  
di Kalimantan ”**

Rumusan Visi tersebut mencerminkan indikator unggul dan luar biasa, serta peran nyata kepada bangsa dan Negara dalam pengembangan Teknologi Agroindustri, Teknologi Mesin dan Otomotif, Teknik Sipil, dan Bisnis dan Ekonomi Terapan, terdapat 2 kata kunci yaitu:

#### a. Pendidikan Tinggi Vokasi Unggul

Kata kunci ini menegaskan posisi Politeknik Negeri Nunukan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi di Indonesia yang fokus pada pengembangan teknologi perikanan, teknik alat berat, teknik sipil dan bidang bisnis serta penunjangnya. Sebagai penyelenggara pendidikan vokasi Teknologi Agroindustri,

Teknologi Mesin dan Otomotif, Teknik Sipil, dan Bisnis dan Ekonomi Terapan serta penunjangnya maka PNN harus dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di bidang teknologi bidang-bidang tersebut dan penunjangnya yang dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian Indonesia, provinsi Kalimantan Utara dan khususnya Kabupaten Nunukan.

Unggul dapat diartikan mempunyai keunggulan kompetitif maupun komparatif di Kalimantan pada tahun 2024 dibanding lembaga Pendidikan Vokasi (lembaga pendidikan tinggi) lainnya di Kalimantan, khususnya unggul dalam persentase jenjang pendidikan dosen, pengembangan teknologi informasi, rasio penelitian dosen, dan rasio pengabdian pada masyarakat, rasio publikasi, dan rasio kompetensi dosen. (unggul dalam sarana prasarana pendidikan, kerjasama).

#### **b. Pendidikan Tinggi Vokasi Luar Biasa**

Makna operasional dari Luar Biasa ini adalah diukur dari beberapa indikator yang dilihat dari Kinerja Akademik, Kinerja Tenaga Kependidikan dan Prestasi Mahasiswa di Kalimantan pada Tahun 2024

Kinerja Akademik diukur dari Indeks Kinerja Utama (IKU), Kinerja Tenaga Kependidikan meliputi keterampilan/skill perkantoran, operasional diatas rata-rata. Antara target harus lebih tinggi secara signifikan capaiannya setiap tahunnya, baik itu dilihat dari lulusan yang mendapat pekerjaan yang layak, maupun dilihat dari beberapa rasio dosen yang menghasilkan penelitian, menghasilkan pengabdian pada masyarakat, menggunakan bilingual (Indonesia-Inggris) dalam pengajaran, serta jumlah lulusan yang mempunyai sertifikat kompetensi.

## **2. Misi**

### **a. Merancang inovasi kurikulum yang fleksibel.**

Arah kebijakan misi yang menekankan bahwa Politeknik Negeri Nunukan diharapkan mampu;

1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi profesi yang berkualitas dan profesional dengan kurikulum yang inovatif dan fleksibel;
2. Mengembangkan dan memperluas akses program pendidikan profesi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan;
3. Meningkatkan daya saing lulusan.

### **b. Mengembangkan Sistem Teknologi Informasi (Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM).**

Arah kebijakan misi b menekankan bahwa Politeknik Negeri Nunukan diharapkan mampu;

1. Menyelenggarakan manajemen administrasi dan operasional pendidikan yang kemahasiswaan, perencanaan, aset, keuangan, kepegawaian, pemasaran/kehumasan, legalitas, kearsipan, logistik, keamanan, belanja barang dan jasa, pelaporan, dokumentasi, monitoring/ evaluasi dengan menggunakan teknologi informasi kekinian dan terpadu;
2. Mempersiapkan seluruh perangkat teknologi informasi efektif dalam rangka menjadi Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelas dunia;
3. Meningkatkan budaya penggunaan sistem informasi digital bagi komunitas internal Politeknik.
4. Mengimbangi pergerakan perkembangan sistem teknologi informasi secara bertahap dan berkesinambungan (*sustainable information technology development*)

**c. Mengoptimalkan dan memberdayakan semua sumberdaya.**

Arah kebijakan misi C menekankan bahwa Politeknik Negeri Nunukan diharapkan mampu :

1. Mengoptimalkan dan memberdayakan sumberdaya manusia baik dosen ataupun tenaga kependidikan;
2. Mengoptimalkan dan memberdayakan sarana dan prasarana perkuliahan;
3. Menciptakan sumberdaya manusia unggul dalam rangka menuju Politeknik yang unggul;
4. Menciptakan penggunaan sarana dan prasarana secara optimal dan efektif .

**d. Mengembangkan riset dan pengembangan terapan, pengabdian pada masyarakat, kerjasama dan publikasi.**

Arah kebijakan misi d menekankan bahwa Politeknik Negeri Nunukan diharapkan mampu:

1. Mengembangkan penelitian terapan dosen dan mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melakukan pengabdian masyarakat secara berkesinambungan;
3. Mengembangkan kerjasama yang mampu memberikan manfaat baik secara kelembagaan dan anggota *civitas* akademik;
4. Mengembangkan partisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi conference, publikasi jurnal, dan event akademik baik regional, nasional maupun internasional;

## **2.2 Sasaran Strategis**

Semangat mewujudkan visi dan misi memerlukan sasaran strategis yang jelas agar tujuan pengembangan, peningkatan

kapasitas dan penguatan program serta kegiatan menjadi terarah. Sasaran strategis ini menjadi *outcome* dari pelaksanaan tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan PNN, dengan rumusan berikut.

- a. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan berbasis kompetensi, pengembangan program pembelajaran berbasis *teaching industry*, Program Studi baru serta daya saing ditingkat nasional dan atau internasional;
- b. Meningkatnya kualitas manajemen Perguruan tinggi modern dalam pengelolaan pendidikan dengan tata kelola manajemen institusi yang berkualitas;
- c. Meningkatnya sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, professional, berkarakter dan beretika
- d. Meningkatnya publikasi karya ilmiah dan karya kreatif- inovatif sivitas akademika; dan
- e. Meningkatnya kerja sama yang mendorong kepakaran dan peran dosen terhadap pemangku kepentingan.

### **2.3 Tujuan Strategis**

Dengan misi tersebut diatas akan dicapai beberapa tujuan utama sebagai berikut:

1. Terbentuknya kurikulum yang berbasis KKNi dan Link and Match terhadap dunia industri;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dibidang teknologi dan bisnis terapan yang profesional, berkarakter dan beretika dan diakui dunia industri melalui pola pendidikan berbasis *Project Base Learning* (PBL) dan metode pemecahan kasus (*case methods*);
3. Terbangunnya sistem teknologi informasi terpadu adademik dan non akademik;

4. Terjadinya Peningkatan kualitas Dosen (Layanan Pendidikan) dan Kualitas Tenaga Kependidikan (Dukungan Layanan Pembelajaran);
5. Terjadinya Peningkatan Sarana dan Prasarana (BOPTN dan PNBPN);
6. Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang mampu memberikan kemanfaatan bagi industri dan masyarakat;
7. Mewujudkan kerja sama guna mendorong kepakaran bidang teknologi dan bisnis yang bermanfaat dan diakui secara nasional dan internasional.

#### **2.4. Indikator Tujuan Strategis PNN**

Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Strategis PNN merupakan suatu rangkaian pencapaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tujuan Strategis yang disusun dalam upaya pencapaian Visi Misi PNN perlu dijabarkan dalam indikator kinerja tujuan yang dapat menetapkan tolak ukur pencapaian tujuan strategis. Indikator Tujuan merupakan target dan acuan kinerja bagi PNN dalam pencapaian Tujuan Strategis. Hubungan antara Misi, Sasaran dan Tujuan strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja Sasaran
1	Merancang Inovasi Kurikulum Yang Fleksibel	Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
			Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.		2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
		Peningkatan jalinan kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang akademik dan non akademik	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	1	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.
			Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.		2	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
			Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja Sasaran
					4	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
2	Mengembangkan Sistem Teknologi Informasi (Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM)	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional	Meningkatnya pendapatan PNBPN	1	Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional
			Realisasi pendapatan PNBPN.		2	Realisasi pendapatan PNBPN.
			Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset.		3	Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset.
			Prosentase penyelesaian modernisasi		4	Prosentase penyelesaian modernisasi
		Menjadikan PNN sebagai Institusi yang menerapkan Good Governance	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB.
			Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.		2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.
3	Mengoptimalkan dan Memberdayakan Semua Sumberdaya	Peningkatan Kualitas Dosen (Layanan Pendidikan) dan Tenaga Kependidikan (Dukungan Layanan Pembelajaran)	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
			Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat		2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja Sasaran
			kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.			industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
4	Mengembangkan Riset dan Pengembangan Terapan, Pengabdian pada Masyarakat, Kerjasama dan Publikasi	Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

Uraian program utama PNN dapat diukur dengan indikator kinerja untuk menentukan capaian *outcome* secara institusi dan capaian hasil kegiatan (*output*), seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Indikator Kinerja**

Kode	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja
S-1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 01	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	1	Survei Kepuasan Mahasiswa
				2	Survei Kepuasan Masyarakat dan Industri
				3	Mahasiswa yang memperoleh beasiswa
				4	Jumlah Mahasiswa Baru yang Diterima Karena Prestasi Olahraga dan Seni

Kode	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja
				5	Mahasiswa yang diluluskan
				6	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi dalam negeri dalam satu tahun
				7	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi luar negeri dalam satu tahun
				8	Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja/bekerja satu tahun setelah lulus
				9	Jumlah lulusan yang terserap dengan berwirausaha satu tahun setelah lulus
				10	Jumlah mahasiswa yang lulus dan melanjutkan ke PT
				11	Hasil Karya Penelitian Terapan Mahasiswa (Berupa Produk)
				12	Hasil karya penelitian terapan mahasiswa yang dapat dihilirisasi ke pasar/masyarakat/industri
				13	Jumlah mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
				14	Pabrik Wirausaha - Mahasiswa D4/D3/D2
				15	Penambahan buku Perpustakaan
				16	Jumlah Pengunjung Perpustakaan
				17	Kurikulum Berbasis DU/DI yang sudah dilaksanakan di kampus

Kode	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja
		IKU 02	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	1	Mahasiswa yang dimagangkan ke Perusahaan Luar Negeri
				2	Mahasiswa yang dimagangkan ke perusahaan dalam negeri
				3	Mahasiswa yang Magang bersertifikat kampus merdeka (microcredensial bermagang) Mahasiswa D4/D3/D2
				4	Mahasiswa mengikuti Studi Independent bersertifikat kampus merdeka (microcredensial non magang) Mahasiswa D4/D3/D2
				5	Forum ajang kreatifitas mahasiswa yang dilaksanakan di kampus
				6	Ajang kreatifitas mahasiswa yang diikuti di luar kampus
				7	Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)
				8	Kampus Mengajar Mahasiswa
				9	Berapa penghargaan/prestasi nasional yang dapat diperoleh dari aktifitas mahasiswa
				10	Berapa penghargaan/prestasi internasional yang dapat diperoleh dari aktifitas mahasiswa
				11	Jumlah mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus

Kode	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja
S-2	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 03	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	1	Akreditasi Lembaga
				2	Jumlah Prodi yang Terakreditasi A
				3	Jumlah Prodi yang Terakreditasi B
				4	Jumlah Prodi D3 yang dimiliki
				5	Jumlah Prodi Sarjana Terapan yang dimiliki
				6	Jumlah Prodi yang Terakreditasi Internasional
		IKU 04	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>teambased project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.	1	Tenaga Kependidikan (Non Dosen) yang ditingkatkan kompetensinya
				2	Dosen yang menerapkan metode pembelajaran PBL
				3	Prodi yg diusulkan dalam Upgrading D3 ke D4
				4	Program Sarjana Terapan yang diusulkan
				5	Produk yang telah dihilirkan oleh TEFA
				6	Bahan ajar Manual (buku) yg diproduksi untuk pembelajaran
				7	Bahan ajar elektronik/ AVA yg diproduksi untuk pembelajaran
				8	Pembelajaran bidang studi berbasis Digital/blended yg dilaksanakan
				9	Media pembelajaran yang dikembangkan untuk praktik pembelajaran
				10	Jumlah mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran <i>Project Based Learning</i> (PBL)

Kode	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja		
				11	Jumlah mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>Case Based Method</i> )		
				12	Penambahan Laboratorium Baru		
				13	Penambahan Sarana Prasarana Praktek		
				IKU 05	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	1	Jumlah Kerja Sama dengan Dunia Kerja (DU/DI) dalam negeri
						2	Jumlah Kerja Sama dengan Dunia Kerja (DU/DI) Luar negeri
						3	Praktisi dari DU/DI dalam negeri yang Mengajar di kampus
						4	Praktisi dari DU/DI di luar negeri yang Mengajar di kampus
S-3	Meningkatnya pendapatan PNBP	IKU 06	Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional.	1	Daya Serap Anggaran Tahunan		
				2	Capaian Serapan SBSN		
		IKU 07	Realisasi pendapatan PNBP	1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
				2	Penerimaan hibah		
				3	Penerimaan Mahasiswa		
				4	Rencana Pengembangan Kampus		
				5	Peningkatan Jumlah Mahasiswa		
				6	Hilirisasi produk terapan kampus		
				7	Matching Fund yang diperoleh		
				8	Competitive Fund yang diperoleh		
				9	Usulan Prodi Baru		

Kode	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja
				10	Usulan Jurusan Baru Yang Diusulkan
		IKU 08	Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset.	1	Perluasan Bangunan
				2	Tambahan tanah yang diperoleh dari berbagai pihak
		IKU 09	Prosentase penyelesaian modernisasi	1	Jenis urusan manajemen kampus berbasis digital
S-4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi			IKU 10	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB
		2	Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di kampus		
		3	Target Keindahan, Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Kenyamanan di kampus		
		4	Penghargaan yang diraih Tingkat Internasional		
		5	Penghargaan yang diraih Tingkat Nasional		
		6	Nilai score SINDE dari Biro Umum Kemdikbudristek		
		7	Publikasi pemberitaan/sosialisasi yang dilaksanakan secara digital		
		8	Publikasi pemberitaan/sosialisasi yang dilaksanakan secara konvensional		
		9	Jumlah dan jenis media informasi dan publikasi		
		10	Jumlah Follower pada Akun Sosial Media		
		11	Jumlah Subscriber pada Akun Youtube Official		
		12	Jumlah Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Daya Tank Kampus		
		13	Pembentukan Tim Humas		

Kode	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja
			Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.	14	Berapa penghargaan nasional yang dapat diperoleh dari aktifitas Tenaga Kependidikan
				15	Berapa penghargaan internasional yang dapat diperoleh dari aktifitas Tenaga Kependidikan
				16	Jumlah Prodi D1/D2 yang dimiliki
		IKU 11		1	Nilai IKPA (indikator kinerja pelaksanaan anggaran) dari Kemenkeu
				2	Nilai EKA (evaluasi kinerja anggaran)
				3	Target Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih WBBM
				4	Penyelesaian temuan Inspektorat Kemdikbudristek
				5	Penyelesaian temuan BPK-RI
				6	Target menjadi BLU/PTNBH
				7	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program D2 Fast Track
8	Program D2 Fast Track yang terbentuk				
9	Prodi yg diusulkan dalam program D2 Fast Track yang sudah berdiri				
S-5	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 12	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat	1	Jumlah dosen tetap
				2	Jumlah dosen P3K
				3	Jumlah dosen berkualifikasi S2 Dalam Negeri
				4	Jumlah dosen berkualifikasi S2 Luar Negeri
				5	Jumlah dosen yg sedang tugas/izin belajar Program Master

Kode	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja
			nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	6	Jumlah dosen yang naik pangkat dan golongan
				7	Jumlah Guru Besar
				8	Jumlah Lektor Kepala
				9	Jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain (nasional)
				10	Jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus QS 100 berdasarkan bidang ilmu
				11	Jumlah dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir
				12	Jumlah dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi tingkat internasional dalam 5 tahun terakhir
		IKU 13	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	1	Jumlah dosen dari PT lain/tidak tetap
				2	Jumlah dosen berkualifikasi S3 Dalam Negeri
				3	Jumlah dosen berkualifikasi S3 Luar Negeri
				4	Jumlah dosen yang mengikuti Program Doctoral
				5	Jumlah dosen yang mengikuti program Post Doctoral
				6	Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan/workshop/seminar/konferensi ke PT Lain di dalam negeri
7	Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan/workshop/seminar/konferensi ke PT Lain di luar negeri				

Kode	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja
				8	Jumlah dosen yg Magang ke Industri dalam negeri
				9	Jumlah dosen yang mengikuti short course di luar negeri
				10	Dosen yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi dosen di Luar Negeri
				11	Bridging course bagi dosen
				12	Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi dosen (serdos)
				13	Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di DUDI
				14	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi dari/diakui oleh DUDI
				15	Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi professional
				17	Usulan Magister terapan
S-6	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	IKU 14	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1	Dosen yg memperoleh hibah bersaing penelitian dari berbagai sumber
				2	Hasil penelitian terapan Dosen yang dipublikasikan
				3	Hasil penelitian terapan Dosen yang dihilirasi ke pasar/industri/masyarakat
				4	HAKI/paten yang diperoleh

Kode	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja
				5	Jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan berhasil mendapat rekognisi nasional
				6	Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan

## Isu Strategis, Kondisi Dan Faktor-Faktor Keberhasilan

### 3.1. Isu-isu Strategis

Dalam era golbalisasi, semua faktor produksi, keuangan, teknologi, jasa informasi dan peralatan dapat bergerak melintasi tapal batas negara tanpa kesulitan berarti. Dunia terasa menjadi semakin sempit, jarak terasa semakin dekat, waktu terasa berjalan semakin cepat, dan mobilitas orang dan barang semakin tinggi. Kondisi tersebut akan mempunyai implikasi langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Implikasi-implikasi yang dimaksud adalah:

Pertama, Road Map Pendidikan Nasional 2020-2035 dimana pendidikan tidak hanya berbasis hard skill tapi lebih kepada soft skill. Road Map ini dirancang mengingat kondisi saat ini Indonesia mengalami Pandemi Covid-19 dan dengan sendirinya mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat. Dalam hal pendidikan akan lebih pada dilaksanakan pembelajaran jarak jauh (online/daring), dan dengan sendirinya minimalisasi biaya, sedangkan kita dihadapkan pada dunia kerja sudah mempercepat akses digital di semua industri, diikuti dengan memperbarui teknologi termasuk *cyber security* (keamanan data) dan tentunya para pelaku wirausaha akan menjadi pendorong penting pemulihan ekonomi dengan menciptakan cara-cara yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian perlu diurai cara bekerja pada masa depan yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan saat ini dengan ditandai dengan munculnya jenis pekerjaan baru, tenaga kerja multi generasi dan beragam, tidak dibatasi

struktur dan tempat, karier ditentukan oleh pekerja bukan perusahaan, digitalisasi dan otomatisasi teknologi, dimana akses dan pengalihan data semakin massif.

Kedua, implementasi pembelajaran yang menggunakan kurikulum sesuai dengan KKNi dengan berbasis “*Link and Match*” . Dengan model pendidikan saat ini tampak signifikan terjadi kesenjangan antara kualitas lulusan perguruan tinggi (termasuk pendidikan tinggi vokasi) dengan syarat minimal kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan dan dipersyaratkan oleh dunia kerja dan industri. Untuk itu diperlukan penyusunan dan penetapan kurikulum yang sesuai dengan rancangan dan pedoman KKNi dan tentunya telah berdasarkan penelitian dan kajian yang mendalam *Link and Match* nya dengan dunia kerja dan dunia industri.

Ketiga, implementasi “Merdeka Belajar” disesuaikan dengan pendidikan vokasi yang efektif. Kebijakan ini merupakan jawaban atas tuntutan agar Perguruan Tinggi dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara optimal dan selalu relevan.

Keempat, perguruan tinggi luar negeri akan semakin mudah menyelenggarakan pendidikan Indonesia, sehingga calon mahasiswa mempunyai peluang yang tinggi untuk memilih perguruan tinggi yang berkualitas. Hal demikian berarti bahwa persaingan antar perguruan tinggi untuk menarik mahasiswa akan semakin ketat. Persaingan tersebut tidak hanya menyangkut *output* melainkan juga biaya penyelenggaraan perguruan tinggi dan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang terkait dengan sumberdaya manusia, fasilitas maupun manajemen.

Isu lain yang mendapatkan perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis adalah implementasi otonomi pendidikan. Pemberlakuan otonomi perguruan tinggi (PT) mempunyai implikasi-implikasi sebagai berikut : (1) adanya mekanisme subsidi pemerintah

terhadap perguruan tinggi milik Pemerintah (PTP), (2) strategi yang ditempuh dalam menggali sumber dana lain di luar subsidi pemerintah, dan (3) strategi yang ditempuh oleh perguruan tinggi dalam memenangkan persaingan antar perguruan tinggi.

Dalam kaitannya dengan strategi yang ditempuh oleh perguruan tinggi dalam memenangkan persaingan antar perguruan tinggi terutama dalam menjaring calon mahasiswa, terhadap kecenderungan bahwa masing-masing perguruan tinggi akan bersikap proaktif, terutama dalam membangun berbagai jaringan (*networking*) dengan berbagai institusi untuk berbagai keperluan, baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Konsekuensinya adalah apabila perguruan tinggi tidak siap dengan langkah-langkah serupa, maka dapat diperkirakan akan selalu tertinggal di belakang dan tidak mampu mengakses berbagai *resources* yang ada di berbagai institusi.

Untuk mendorong terwujudnya perguruan tinggi yang berkualitas, pengelolaan perguruan tinggi secara otonom tidaklah cukup, tetapi juga harus dikelola dalam lingkungan organisasi yang sehat. Oleh karenanya perguruan tinggi dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas institusional dan mutu manajemennya yang mencakup seluruh aspek manajemen pada setiap jenjang organisasi. Aspek manajemen yang dimaksud mencakup bidang program akademik, sumber daya (manusia, keuangan, sarana, dan prasarana, dan informasi), dan mutu. Pada prinsipnya, perguruan tinggi diharapkan untuk dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip Good Polytechnic Governance (GUG) serta mengutamakan mutu layanan khususnya untuk stakeholder internal yaitu mahasiswa, staf pengajar dan karyawan.

### 3.2. Kondisi Saat ini

#### 3.2.1 Sumberdaya Manusia

Keseluruhan sumber daya manusia baik dosen maupun tenaga administrasi dapat mendukung perancangan pengembangan pelaksanaan dan evaluasi Program Politeknik adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. Data Dosen Pendukung Penyelenggaraan Program Politkenik Negeri Nunukan berdasarkan latar belakang**

Program Studi	SARJANA		MAGISTER		DOKTOR	
	Bidang	Non Bidang	Bidang Studi	Non Bidang Studi	Bidang Studi	Non Bidang Studi
Teknik Alat Berat	2	1	5	1	-	-
Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan	8	5	3	-	-	-
Teknologi Hasil Perikanan	2	6	3	-	-	-
Administrasi Bisnis	4	7	8	3	1	-
<b>Jumlah</b>	16	19	19	4	1	0

**Tabel 4. Data Pendukung Tenaga Administrasi dan Penunjang Politkenik Negeri Nunukan Latar Belakang Pendidikan**

Program Studi	Latar Belakang Pendidikan						Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3	SI/D4	S2	
Teknologi Hasil Perikanan					1		1
Teknik Alat Berat				1			1
Administrasi Bisnis				2			2
Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan			1		1		2
Teknisi THP					1		0
Teknisi Alat Berat				1			0
Teknisi Sipil				1			0
Teknisi Komputer					1		0
<b>Jumlah</b>							10

Dari data pendidik yang ada, tenaga pendidik yang berasal dari kabupaten Nunukan mayoritas masih memiliki kualifikasi pendidikan strata 1. Sebagai lembaga pendidikan yang ingin bergerak maju, Politeknik berencana untuk terus meningkatkan

kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusianya khususnya tenaga pendidik. Di samping peningkatan secara kualitas, peningkatan kuantitas pendidik juga menjadi program yang harus dilaksanakan karena jumlah tenaga pendidik yang memadai akan menjamin keterlaksanaan proses pembelajaran yang lebih baik.

### 3.2.2. Sarana Prasarana

Tujuan Pembelajaran tidak akan tercapai bila tidak didukung oleh sarana prasarana pengajaran, baik itu berupa bahan, alat, maupun ruang belajar itu sendiri. Politeknik Paser mengidentifikasi perolehan sarana dan prasarana pembelajaran tersebut sebagai berikut

**Tabel 5. Sarana Dan Prasarana Politeknik Negeri Nunukan**

No	Nama Sarana/Prasarana	Jumlah (lakol)	Kapasitas Per Ruang	Lokasi
				Kampus Utama
1	Ruang Kerja	10	2-3	√
2	Ruang Teori/Kuliah	13	25	√
3	Laboratorium Terpadu Sofware	-	25	√
4	Laboratorium Bahasa	-	-	√
5	Perpustakaan	1	30	√
6	Kamar Mandi	15	1	√
7	Tempat Ibadah	1	20	√
8	Lapangan Dan Sarana Olahraga	-	-	√
9	Ruang Administrasi (BAU)	1	6	√
10	Ruang Dosen	1	8	√
11	Ruang UKM	1	6	√
12	Laboratorium Komputer	1	25	√
13	Bengkel Alat Berat	1	25	√
14	Bengkel otomotif	-	-	√
15	Laboratorium Sipil	1	25	√
16	Laboratorium Pengetikan	1	25	√
17	Laboratorium Perkantoran	1	25	√

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian di dalam perumusan Rencana Strategis adalah kondisi internal insitusi

sendiri, baik dalam kaitannya dengan kekuatan dan kelemahan maupun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan. Oleh karena itu, Politeknik Nunukan perlu mengidentifikasi secara lebih cermat dan jujur kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan tersebut serta dapat merumuskan strategis yang tepat untuk mengoptimalisasi kekuatan dan meminimalisasikan kelemahan tersebut.

**BAB**

# 4

## Arah Dan Strategi Pengembangan Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020-2024

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya manusia seutuhnya yang berlandaskan Pancasila sebagai landasan Idiil dan UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional. Hal ini ditujukan untuk terjaganya keutuhan kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Sebagai landasan Idiil, maka Pancasila memberi pedoman setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertindak sehingga tetap mempererat rasa nasionalisme. Sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 merupakan sumber hukum yang digunakan sebagai pedoman penentuan berbagai norma dan etika yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang nomor 25 tahun 2000 menyatakan bahwa ada 3 tantangan besar yaitu :

1. Mempertahankan hasil hasil Pendidikan yang telah dicapai;
2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam masa kerja;
3. Sejalan dengan diterapkan otonomi daerah system Pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyusuaian sehingga dapat mewujudkan sistem Pendidikan yang lebih demokratis memperhatikan keberagaman kebutuhan daerah dan peserta didik serta mendorong partisipasi masyarakat.

Mempertahankan hasil hasil Pendidikan yang telah dicapai seperti halnya mempertahankan tingkat indek pembangunan

manusia, indeks daya saing, indeks teknologi dengan cara menerapkan kurikulum berbasis KKNI dan aplikatif serta menerapkan model dan konsep *link and match*.

Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam masa kerja dalam hal ini melakukan beberapa hal seperti meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa melalui pelatihan dan uji kompetensi dengan melibatkan industri, meningkatkan Kerjasama dengan berbagai dunia usaha dan industri (DUDI) sebagai refleksi dan implemementasi konsep merdeka belajar, meningkatkan saran dan prasarana Pendidikan, meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan terapan dengan output publikasi Ilmiah.

Untuk mewujudkan sistem Pendidikan yang lebih demokratis memperhatikan keberagaman kebutuhan daerah dan peserta didik serta mendorong partisipasi masyarakat dapat dicapai melalui penerapan dan berbagai bentuk dan model Merdeka Belajar serta menyediakan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan konsep peta jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang pada dasarnya memfokuskan pada teknologi, sosiokultural dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus Pendidikan nasional harus berbasis teknologi, sosiokultural dan lingkungan secara seimbang. Keseimbangan tersebut dijabarkan dalam implementasi Merdeka Belajar.

Sasaran Pendidikan yang berfokus pada teknologi mencakup penerapan otomatisasi, AI (*artificial intelligence*), dan big data di semua sektor, konektivitas 5G yang memungkinkan teknologi lainnya saling terhubung seperti kendaraan otonom, drone, dan pencetakan 3D (*3D printing*) *smart wearables*, *augmented* dan realitas maya (*virtual reality*) (AR dan VR).

Sasaran Pendidikan yang berfokus pada sosiokultural mencakup peningkatan usia harapan hidup dan usia lama bekerja, tumbuhnya migrasi, urbanisasi, keberagaman budaya, dan kelas menengah, meningkatkan tenaga kerja yang terus bergerak (*mobile*) dan fleksibel serta munculnya kepedulian konsumen terhadap etika, privasi dan kesehatan.

Sasaran Pendidikan yang berfokus pada lingkungan mencakup peningkatan kebutuhan energi dan air dan berkurangnya sumber daya alam, peningkatan terhadap energi alternatif untuk melawan perubahan iklim serta upaya berkelanjutan pada isu lingkungan seperti plastik dan limbah nuklir.

Ketiga fokus tersebut diatas dicapai dengan beberapa arah kebijakan Pendidikan nasional, salah satunya adalah membangun kompetensi utama yang berorientasi masa depan khususnya perkembangan kurikulum yang fleksibel berdasarkan kompetensi sebagai kerangka menu, penekanan pada ketrampilan lunak (*softskill*) dan pengembangan karakter, dan pelatihan vokasi yang dipimpin industri.

Arah kebijakan dan strategi pengembangan Politeknik Negeri Nunukan berpedoman pada Peta Jalan Pendidikan Nasional diatas dengan memanfaatkan sumber daya internal maupun eksternal PNN.

Adapun arah dan kebijakan PNN tersebut dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan
2. Strategi pengembangan
3. Tata Kelola
4. Reformasi Birokrasi

## **4.1. Arah Kebijakan**

### **4.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran kementerian sesuai Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### **a. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan**

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi angka partisipasi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. semua anak usia sekolah dan prasekolah mendapatkan layanan pendidikan; dan
2. lulusan pendidikan tinggi meningkat.

Strategi kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lulusan pendidikan tinggi meningkat sebagai berikut:

1. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan akademik dan vokasi berkualitas yang relevan dengan kebutuhan daerah;
2. memperkuat peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi; dan
3. menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi bagi lulusan pendidikan menengah dari keluarga tidak mampu.

#### **b. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan**

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa indonesia dan berkewargan global;
2. sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas;
3. lulusan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia

kerja;

4. lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional; dan
5. sumber belajar yang relevan dan berkualitas.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lulusan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebagai berikut:

1. menjalankan program SMK Pusat Keunggulan serta Kampus Merdeka untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran serta peningkatan kualitas lulusan;
2. membangun keterlibatan dan partisipasi dunia industri untuk: (1) memetakan kebutuhan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja; (2) menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan standar industri; (3) menyediakan pemagangan dan praktik kerja; (4) mendorong penyerapan lulusan pendidikan vokasi; dan (5) menjamin keselarasan melalui pemberian sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar dan kebutuhan industri;
3. membangun kerja sama antar perguruan tinggi akademik dengan perguruan tinggi kelas dunia (internasional) dan dunia industri dalam rangka memperkuat kualitas pembelajaran melalui: penguatan kompetensi pengajar, pertukaran praktik baik pengajaran, dan penguatan pengukuran mutu lulusan;
4. menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai *centres of excellence* dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi kelas dunia dan pembinaan perguruan tinggi lainnya yang sedang berkembang dan pembentukan *Science Techno Park* di lima universitas: Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut

Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

5. menitikberatkan pengembangan *soft skills* seperti: kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan komunikasi, termasuk penanaman nilai etos kerja, serta kemampuan berwirausaha sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja; dan
6. mengembangkan *platform* teknologi untuk memfasilitasi penyampaian informasi lapangan kerja, peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja serta sebagai alat bantu informasi untuk merekam jejak kebekerjaan lulusan.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sebagai berikut:

1. penguatan pelibatan komunitas pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan, seperti: pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi bidang pendidikan;
2. meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dengan mendorong dosen melakukan kemitraan dengan pihak luar kampus dengan fokus pada (1) memperoleh pengalaman praktik di dunia industri; (2) melibatkan praktisi untuk terlibat dalam pembelajaran di kampus; dan (3) kerja sama dengan pengajar dari kampus kelas dunia; dan
3. strategi revitalisasi LPTK, yaitu:
  - a) Penguatan *Higher Order Thinking Skills (HOTS) Literacy* dan Pendampingan dalam Pembelajaran;
  - b) Penguatan Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif;
  - c) Inovasi Pembelajaran Berbasis Model Kolaboratif dan

Partisipatif;

- d) Pengembangan Modul Digital Berbasis *Micro Learning*;
- e) Program *Micro Credentials* Bersertifikat; dan
- f) Program Pengalaman Belajar Mahasiswa di Luar Kampus.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi sumber belajar yang relevan dan berkualitas sebagai berikut:

1. Mengembangkan desain sistem perbukuan yang secara aktif melibatkan aktor perbukuan di pusat, daerah, perwakilan masyarakat, dan sektor swasta;
2. Mengembangkan sistem informasi perbukuan untuk mendukung pendataan aktor perbukuan, produk perbukuan, dan publikasi lainnya;
3. Melaksanakan penjaminan sektor perbukuan untuk meyakinkan produk perbukuan dan publikasi memenuhi standar kualitas;
4. Menyediakan bahan pengayaan literasi berkualitas dalam berbagai moda;
5. Memberdayakan pengayaan materi bacaan berjenis yang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan dengan usia; dan
6. Memanfaatkan *platform* digital untuk penyediaan sumber belajar yang berkualitas bagi pendidik dan Peserta Didik.

### **c. Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

Kondisi yang ingin dicapai dalam memajukan dan melestarikan bahasa dan kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan;
2. Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional; dan

### 3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan nalar kritis pendidik dan peserta didik melalui bahasa sebagai implementasi merdeka belajar;
2. Meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan melalui pendekatan tematik terpadu;
3. Meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai media pengembangan literasi dalam pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran;
4. Mengoptimalkan peran bahasa sebagai wahana pendidikan karakter;
5. Mengoptimalkan peran bahasa sebagai sarana pembentuk jati diri dan pikiran keindonesiaan pendidik dan peserta didik;
6. Meningkatkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas awal; dan
7. Memajukan budaya melalui wahana pendidikan di berbagai jenjang dan berbagai ranah.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi penggunaan Bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional sebagai berikut:

1. Menerapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati dan penutur asing bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan dan konteks penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia;
2. Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia dalam pengembangan program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing sebagai salah satu instrumen utama diplomasi lunak Indonesia; dan

3. Meningkatkan partisipasi publik (diaspora Indonesia, pelajar Indonesia, sahabat Indonesia (*friends of Indonesia*), dan Indonesianis) serta pemangku kepentingan dalam pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di luar negeri.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut:

1. memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3. mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;
4. mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
6. reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan;
7. meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan;
8. meningkatkan peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa dan sastra daerah;
9. mengembangkan model konservasi dan revitalisasi untuk mencegah kepunahan bahasa dan sastra daerah; dan
10. mendokumentasikan bahasa dan sastra daerah untuk perlindungan bahasa dan sastra daerah.

**d. Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi, dan Ilmu Pengetahuan**

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

1. penelitian perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
2. hasil penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi penelitian perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga riset nasional maupun internasional untuk mengikuti perkembangan riset, teknologi, dan ilmu pengetahuan global;
2. memperkuat proses diskusi antara dunia industri dan pemerintah untuk sinergi dukungan dan meningkatkan relevansi penelitian; dan
3. mengupayakan pengembangan dan penguatan infrastruktur penelitian strategis di perguruan tinggi.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi hasil penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebagai berikut:

1. mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
2. memperkuat kerja sama dengan dunia industri untuk mendorong hilirisasi penerapan hasil penelitian;
3. memperkuat mekanisme penjaminan mutu proses penelitian

- untuk memperoleh rekognisi internasional; dan
4. mengupayakan pengembangan dan penguatan infrastruktur penelitian strategis di perguruan tinggi.

**e. Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel**

Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah sebagai berikut:

1. tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas;
2. pelayanan publik yang prima.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas sebagai berikut:

1. penyempurnaan kerangka regulasi bidang pendidikan untuk memperkuat fokus pada mutu dan relevansi pendidikan serta penguatan otonomi satuan pendidikan dan peran guru;
2. memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;
3. memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah;
4. penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundangundangan;
5. memperkuat mekanisme pengelolaan dana transfer daerah bidang pendidikan yang lebih terkoordinasi dengan baik;
6. mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia Kemendikbudristek yang berbasis mekanisme

manajemen talenta.

Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi pelayanan publik yang prima sebagai berikut:

1. pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian;
2. memperkuat pengelolaan pembiayaan pendidikan untuk memaksimalkan kontribusi pembiayaan dalam pencapaian sasaran pendidikan di bidang akses dan mutu;
3. mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk menumbuhkan penguatan pendanaan pendidikan.

#### **4.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Nunukan**

Arah kebijakan dan strategi PNN untuk periode 2020-2024 berfokus pada Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan tri dharma, serta sarana dan prasarana penunjang sebagaimana tertuang pada RIP PNN. Arah kebijakan ini tentunya telah diselaraskan dengan Rancangan Teknokratik Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek dan arah kebijakan dan strategi Kemenristek Tahun 2022.

Target pencapaian rencana strategis adalah terpenuhinya lima Program Prioritas PNN yaitu: (1) Peningkatan kualitas dan daya saing lulusan serta pengembangan pembelajaran berbasis *project based learning*; (2) Peningkatan sistem informasi berbasis teknologi digital (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) (4) Peningkatan Sarana dan Prasarana (BOPTN dan PNBPN), (5) Peningkatan publikasi karya ilmiah dan karya kreatif-inovatif; serta (6) Penguatan dan pengembangan kerja sama dengan mitra DUDI. Keenam kegiatan tersebut diukur dari pencapaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) pada akhir tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi PNN menjadi perguruan tinggi terapan yang unggul dalam Pusat Inovasi Teknologi dan Bisnis (keunggulan kompetitif) serta mempunyai daya saing dalam menghadapi ancaman/tantangan ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mendukung arah dan kebijakan Kemendikbudristek serta agenda pembangunan nasional, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing lulusan serta pengembangan pembelajaran berbasis project based learning  
Strategi peningkatan Kualitas dan Daya Saing lulusan antara lain dengan peningkatan lulusan yang terserap pada dunia industri yaitu diantaranya dengan memberikan fasilitas berupa sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri sebagai daya dukung mahasiswa dalam mencari pekerjaan. Peningkatan kelas kerja sama dengan berbagai industri yang dapat memberikan manfaat bagi lulusan untuk dapat bekerja di industri terkait. Peningkatan jumlah industri yang berpartisipasi dalam pengadaan *jobfair* setiap tahun. Strategi peningkatan lulusan PNN yang terserap dengan berwirausaha dengan memberikan bekal ilmu kewirausahaan melalui mata kuliah teori dan praktek yang tersedia di PNN, peningkatan bimbingan teknis secara intensif dari dosen mengenai pentingnya berwirausaha, serta kegiatan rutin proposal mahasiswa wirausaha (PMW) untuk mendorong minat mahasiswa berwirausaha dan mendapatkan pengalaman memulai usaha.
2. Peningkatan sistem informasi berbasis teknologi digital  
Sistem Informasi Manajemen Politeknik Negeri Nunukan yang telah dibangun belum secara menyeluruh terintegrasi sehingga perlu dilakukan peningkatan agar berbagai bidang, akademik,

kemahasiswaan, penelitian, pengabdian masyarakat, pusat karir, kepegawaian, umum dan lain-lain dapat di akses dalam satu sistem informasi. Penggunaan sistem informasi yang masif dalam seluruh proses membutuhkan dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang kuat untuk mendukung kecepatan, keamanan dan kehandalan sistem.

Peningkatkan kinerja tata kelola satuan kerja di PNN akan dilakukan penguatan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja dan penguatan terhadap kinerja anggaran yang meliputi komponen Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

### 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kualitas dosen pendidikan tinggi merupakan faktor penting dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi. Kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang sesuai dengan program studi menentukan kualitas dosen pendidikan tinggi. Salah satu indikator peningkatan kualitas dosen adalah persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. Untuk meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi dapat dilaksanakan melalui pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dimulai dengan pemetaan, perencanaan dan pembinaan karir dosen serta monitoring dan evaluasi.

Dalam rangka peningkatan kualitas dosen khususnya untuk persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja

sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, maka perlu dilaksanakan peningkatan kerja sama dengan PT lain dan DUDI dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Dengan adanya kerja sama yang telah terjalin dengan PT lain, maka hal ini dapat menjadi penghubung bagi dosen-dosen meningkatkan kegiatan tridarma di perguruan tinggi lain. Dosen dapat menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah di kampus lain maupun yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan ilmu. Selain itu memberikan peluang bagi dosen untuk melakukan kolaborasi penelitian dan pengabdian masyarakat dengan dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan dan dipublikasikan. Kerja sama dengan DUDI juga dilakukan dalam memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen, pelibatan praktisi DUDI untuk mengajar di kampus, maupun kegiatan tridarma lainnya.

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana (BOPTN dan PNBPN).

Ketersediaan Sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran perlu terus ditingkatkan guna mengikuti perkembangan teknologi dan aspek kecukupan.

5. Peningkatan publikasi karya ilmiah dan karya kreatif-inovatif

Sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan pendidikan Politeknik Negeri Nunukan dalam bidang vokasi, Politeknik Negeri Nunukan memiliki peluang yang sangat besar dalam pengembangan inovasi dan riset terapan. Program-program penelitian dilaksanakan secara inovatif agar menghasilkan produk inovatif sehingga dapat membantu pemecahan masalah masyarakat. Kebijakan ini searah dengan kebijakan kemenristekdikti dalam hal peningkatan jumlah publikasi

internasional, HaKI yang didaftarkan, prototipe hasil R&D, dan prototipe industri; serta upaya untuk meningkatkan jumlah produk inovasi yaitu produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara inovatif yang berarti menyelenggarakan program pengabdian masyarakat yang dapat membantu pemecahan masalah terkini yang dihadapi dan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

6. Penguatan dan pengembangan kerja sama dengan mitra DUDI  
Kerja sama dengan industri masih menjadi arah kebijakan karena cakupan bidang dalam kerja sama dengan industri masih dapat terus dikembangkan. Peningkatan kerja sama dengan Industri khususnya merupakan sumber inovasi. Hal ini dikarenakan dalam dunia industri terjadi persaingan secara terus menerus. Sebagai pendidil-an vokasi, PNN mengedapankan kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja yang secara tidak langsung juga memberikan keuntungan bagi industri selaku pengguna.

#### **4.2. Strategi pengembangan**

Mengacu pada Rencana Induk Pengembangan PNN dalam meraih visinya pada tahun 2024, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Sebagai langkah awal dalam menentukan strategi pengembangan PNN ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan potensi, kendala, peluang dan ancaman yang menuntut untuk lebih efektif dan efisien dalam mengikuti dan mengantisipasi perkembangan peradaban global yang penuh dengan persaingan.

1. Evaluasi diri dan penguatan (*self evaluation and strengthening strategy*)

Evaluasi diri mencakup analisis lingkungan, baik eksternal maupun internal, yang diperkirakan memiliki pengaruh penting terhadap eksistensi maupun strategi pengembangan PNN di masa datang. Evaluasi dilakukan terhadap 4 komponen pengelolaan, yaitu akademik, umum dan keuangan, kemahasiswaan dan kerjasama.

2. Penguatan (*strengthening strategy*)

penguatan mutu pendidikan dan penguatan mutu layanan yang mengacu pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Penguatan tata kelola PNN sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri (*Link and Match*) yang berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada pengembangan karakter bangsa serta menjamin proses dan iklim pembelajaran yang kondusif, didukung oleh SDM yang kompeten dalam bidang tridharma, serta pemanfaatan sistem informasi berbasis IT.

3. Pembangunan Kerjasama (*networking building*)

Kerjasama dengan industri masih menjadi arah pengembangan karena cakupan bidang dalam kerjasama dengan industri yang dapat dijadikan sumber inovasi. PNN memiliki banyak peluang kerjasama dengan beberapa bidang industri karena merupakan satu-satunya Politeknik Negeri yang ada di Kalimantan Utara.

4. Pembangunan dan pengembangan Kerjasama (*networking building and developing*)

Pengembangan kerjasama industri dapat dilakukan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan tri dharma, diantaranya kegiatan pengembangan kurikulum, penelitian, dan pengabdian.

### 4.3. Tata Kelola

PNN saat ini menerapkan organisasi dan tata kerja sesuai dengan ketetapan dalam **Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05/O/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PNN**. Susunan organisasi PNN seperti yang tertuang pada Keputusan Menteri tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Direktur dan Pembantu Direktur;
2. Senat Politeknik;
3. Saat ini Politeknik Negeri Nunukan memiliki 4 Jurusan yang terdiri dari 4 Program Studi yakni: Jurusan Administrasi Bisnis, Teknik Sipil, Teknik Alat berat, dan Teknologi Hasil Perikanan;
4. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M);
5. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP);
6. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
7. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
8. Bagian Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi;
9. Unit Pelaksana Teknis: UPT Perpustakaan, UPT Permesinan, UPT Laboratorium Terpadu dan UPT Teknologi Informasi dan Kominikasi;
10. Dewan Penyantun.

Tata kerja organisasi PNN sebelumnya dikelompokkan menjadi 5 unsur, yaitu (1) Pimpinan Politeknik, (2) Senat Politeknik, (3) Pelaksana Akademik, (4) Pelaksana Administrasi, dan (5) Pelaksana Teknis. Tugas dan fungsi dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemimpin Politeknik

PNN dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh empat orang Pembantu Direktur. Pembantu Direktur terdiri atas: (1) Wakil Direktur Bidang Akademik disebut Wakil Direktur I, (2) Wakil Direktur Bidang

Non Akademik yang menangani Kepegawaian dan keuangan disebut Wakil Direktur II

## 2. Senat Politeknik

Senat PNN merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi PNN yang terdiri atas Pimpinan PNN, Ketua Jurusan, Kepala Lembaga dan 2 (dua) orang Dosen tetap sebagai wakil masing-masing Jurusan. Senat diketuai oleh Direktur dan dibantu oleh Sekretaris yang dipilih di antara anggota SenatPNN. Direktur sebagai Ketua Senat dapat mengangkat pejabat-pejabat atau perorangan penting lainnya sebagai anggota Senat melalui persetujuan Senat Politeknik. Tata cara pemilihan dan pengangkatan wakil dosen dari setiap Fakultas dan penetapan pejabat serta perorangan penting lainnya ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Senat PNN. Senat PNN memiliki 2 (lima) komisi-komisi yang dipimpin oleh seorang Ketua Komisi, yaitu Komisi Akademik, Komisi non akademik

## 3. Unsur Pelaksana Akademik

Unsur pelaksana akademik terdiri dari Jurusan, Program Studi, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan unit Pelaksana Teknis.

### a) Jurusan

Jurusan merupakan pusat kegiatan ilmiah dan masyarakat ilmiah dalam disiplin ilmu yang ditetapkan sesuai kebutuhan, berperan sebagai pusat sumber daya akademis yang melaksanakan satu atau lebih program studi, sendiri atau bersama-sama dengan jurusan lain. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Direktur atas usulan ketua jurusan. Laboratorium, studio, bengkel kerja dan unit penunjang akademik lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan

dan/atau penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Jurusan. Koordinator laboratorium, studio, bengkel kerja, dan unit penunjang lainnya yang ada di jurusan diangkat oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

b) Program Studi

Program Studi adalah unsur penyelenggara program di bidang disiplin ilmu tertentu yang lebih spesifik. Program studi dipimpin oleh seorang Koordinator Program Studi yang diangkat oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan. Koordinator Program Studi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan program studi

c) Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P3M)

Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik dibidang penelitian, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. pusat penelitian dan pengabdian. Pusat Studi dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang di angkat oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur

4. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP)

P4MP dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. P4MP mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan serta melaksanakan layanan pendidikan profesi guru dan penjaminan mutu. Untuk melaksanakan tugas tersebut P4MP mempunyai fungsi: (1) mengembangkan model layanan akademik dan disabilitas; (2)

mengembangkan model, mengelola, dan mengoordinasikan Program Pengalaman Lapangan; (3) mengembangkan layanan dan mengoordinasikan program sertifikasi dan pendidikan profesi; (4) mengembangkan kurikulum dan mengelola mata kuliah Politeknik; (5) mengembangkan sumber belajar dan berkala ilmiah; (6) mengembangkan standar penjaminan mutu internal; dengan siklus kegiatan penentuan, pemenuhan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar/ukuran yang ditetapkan oleh PNN dalam dokumen kebijakan SPMI; manual SPMI; standar dalam SPMI; dan. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI; serta mengevaluasi data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PNN; (7) mengembangkan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu; (8) mengembangkan kegiatan audit mutu internal; (9) melaksanakan kegiatan pendidikan pelatihan dan kerja sama bidang penjaminan mutu.

#### 5. Unsur Pelaksana Administrasi

Unsur pelaksana administrasi terdiri dari beberapa bagian yaitu (a) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (b) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dan (c) Bagian Administrasi Perencanaan dan bagian Sistem Informasi Tupoksi masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

##### a) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah Direktur dan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan PNN. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut BAAK mempunyai fungsi (a) Pelaksanaan administrasi Akademik, (b) Pelaksanaan administrasi

kemahasiswaan. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- 1) Bagian Akademik, mempunyai tugas melaksanakan administrasi Akademik, dengan fungsi: Pelaksanaan administrasi pendidikan dan evaluasi, Pelaksanaan registrasi dan statistik, Pelaksanaan administrasi sarana pendidikan.
  - 2) Bagian Kemahasiswaan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan dengan fungsi: Pelaksanaan administrasi minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan dan Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa.
- b) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Bagian Administrasi umum dan keuangan adalah unsur pelaksana di bidang administrasi umum dan keuangan bertanggung jawab kepada wadil Direktorat 2, dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan PNN. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi: (a) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, hukum dan tata laksana, dan perlengkapan, (b) Pelaksanaan urusan kepegawaian, dan (c) Pelaksanaan urusan keuangan. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas: Bagian umum, hukum dan tata laksana dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, rumah tangga, hukum dan tata laksana dan perlengkapan, dengan fungsi: (1) Pelaksanaan urusan tata usaha, (2) Pelaksanaan urusan rumah tangga, (3) Pelaksanaan urusan hukum dan tata laksana dan (4) Pelaksanaan urusan perlengkapan.

- 1) Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

urusan kepegawaian, dengan fungsi: Pelaksanaan administrasi tenaga akademik dan Pelaksanaan administrasi tenaga administrasi.

- 2) Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, dengan fungsi: Pelaksanaan administrasi anggaran rutin dan pengkoordinasian anggaran pembangunan, Pelaksanaan administrasi dana yang berasal dari dana masyarakat, dan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- 3) Bagian Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pelaksana di bidang perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur, dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas memberikan layanan administrasi perencanaan dan sistem informasi di lingkungan PNN dengan fungsi: Pelaksanaan administrasi perencanaan dan Pelaksanaan administrasi sistem informasi. Bagian Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas:
  - a) Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan dan mempunyai fungsi: Pelaksanaan administrasi perencanaan akademik dan Pelaksanaan administrasi perencanaan fisik
  - b) Bagian Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi sistem informasi dan mempunyai fungsi: Pengumpulan dan pengolahan data Pemberian layanan informasi.

## 6. Unit Pelaksana Teknis

### a. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang kepastakaan, dokumentasi, informasi, kemudahan proses

belajar-mengajar, pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perpustakaan PNN dipimpin oleh seorang Kepala dan seorang Wakil Kepala yang terdiri atas kelompok pustakawan dibantu oleh teknisi dan tenaga administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

b. Teknologi Informasi dan Komunikasi

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK), adalah unit kerja bidang pengembangan, implementasi, pengelolaan, perawatan, dan layanan TIK untuk mendukung operasional manajemen Politeknik, serta mendukung pengambilan keputusan pimpinan dan strategi pengembangan Politeknik. UPT TIK bertugas melakukan pengembangan, implementasi dan pemeliharaan infrastruktur dan sistem informasi, memberikan layanan TIK. Untuk menyelenggarakan tugas, Puskom mempunyai fungsi: (1) mendukung dan melaksanakan pengembangan TIK di Politeknik; (2) mendukung operasional dan manajemen akademik Politeknik; (3) mendukung penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Politeknik melalui sistem informasi dan komunikasi; (4) mendukung pengembangan sistem data dan informasi untuk pengambilan keputusan pimpinan dan strategi pengembangan Politeknik.

c. Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik

UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Unit Penunjang Akademik Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik memiliki fungsi tugas perawatan dan perbaikan sarana

prasarana pembelajaran, perkantoran, utilitas kampus dan lingkungan.

d. Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu

Unit Laboratorium Terpadu adalah unit penunjang yang menjalankan fungsi pelayanan operasional seluruh penyelenggaraan laboratorium. Untuk menjalankan fungsi, Unit Laboratorium Terpadu memiliki tugas: (1) Menyediakan layanan laboratorium untuk penyelenggaraan penunjang pendidikan sesuai program studi; (2) Menyediakan layanan laboratorium untuk penyelenggaraan pendidikan akademik dan nonakademik; (3) Melakukan administrasi dan pelayanan laboratorium terpadu.



**Gambar 1. Stuktur Organisasi**

#### 4.4. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dan merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi juga menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta pemerintahan yang

sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan.

Langkah konkret dalam rangka mengakselerasi pencapaian program kerja Reformasi Birokrasi pada unit kerja pemerintahan yaitu Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Reformasi Birokrasi meliputi delapan area perubahan, yaitu:

a. Manajemen Perubahan

Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

b. Penguatan Peraturan dan perundangan

Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan. Penguatan peraturan perundangan diharapkan tercapai melalui meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan; meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

c. Penguatan Kelembagaan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Penguatan kelembagaan diharapkan dapat menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal. Selain juga untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.

d. Penguatan Tata laksana

Target dari penguatan tata laksana adalah meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government; meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; serta meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik.

e. Penguatan Sistem Manajemen SDM

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target penguatan system manajemen SDM adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur; meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur; serta meningkatnya disiplin SDM Aparatur;

f. Penguatan Pengawasan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target penguatan pengawasan adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;

Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang penyimpangan oleh aparatur; serta memperoleh opini WTP

g. Penguatan Akuntabilitas

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Target penguatan akuntabilitas adalah meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi; meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja; serta meningkatnya akuntabilitas aparatur.

h. Penguatan Kualitas

Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing unit organisasi sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target penguatan kualitas layanan public adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih baik, lebih murah); meningkatnya jumlah unit pelayanan yang menerapkan standar pelayanan publik; Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; serta meningkatnya profesionalisme aparatur.

#### **4.3.1 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Reformasi Birokrasi PNN**

Saat ini PNN telah memiliki tim Reformasi Birokrasi yang bertanggung jawab dan melaporkan kepada Direktur PNN terkait implementasi dan kemajuan Reformasi birokrasi PNN. Untuk melakukan perbaikan terus menerus, PNN telah mengalokasikan sumber daya untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi di PNN. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di PNN, dengan mengacu pada hasil evaluasi pembangunan Refomasi Birokrasi di PNN.

**Tabel 6. Prioritas Pembangunan Reformasi Birokrasi**

Bidang Penguatan		2021	2022	2023	2024
1	Manajemen Perubahan				
2	Deregulasi Perundangan				
3	Penguatan Kelembagaan/ Organisasi				
4	Penguatan Tata Laksana				
5	Penguatan Manajemen SDM				
6	Penguatan Akuntabilitas				
7	Penguatan Pengawasan				
8	Penguatan Area Pelayanan Publik				
9	Quick Wins/ Unit Layanan Terpadu PNN				

#### 4.3.2 Target Kinerja Reformasi Birokrasi PNN

Target pembangunan ZI, WBK/WBBM di PNN menggunakan baseline penilaian pembangunan ZI tahun 2023 dengan skor 40. Dengan target peningkatan di tahun 2024 menjadi 50.

**Tabel 7. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih 2020-2024**

TAHUN	Base line 2021	2023	2024
Target Indeks RB PNN	-	40	50

Reformasi Birokrasi memerlukan sistem pendukung untuk menguatkan 8 area perubahan. Target pembangunan Reformasi Birokrasi PNN dari aspek pengembangan sistem dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 8. Pembangunan Reformasi Birokrasi PNN**

Bidang Penguatan/ Instrumen Reformasi Birokrasi		Ada/ Belum Ada	Base Line 2021	2023	2024
<b>1. Manajemen Perubahan</b>					
a	Tim RE / ZI	Ada			
b	Roadmap RB / Rencana Pembangunan ZI	Belum Ada			
c	Pemantauan dan Evaluasi RB / ZI	Belum Ada			
d	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Belum Ada			
<b>2. Deregulasi Perundangan</b>					
a	Harmonisasi	Belum Dilakukan			
b	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan / keputusan	Belum Dilakukan			
<b>3. Penguatan Kelembagaan/ Organisasi</b>					
a	Penataan organisasi	Belum Ada			
b	Evaluasi kelembagaan	Belum Ada			
c	Tindak lanjut evaluasi	Belum Ada			
<b>4. Penguatan Tatalaksana</b>					
a	Proses Bisnis dan Prosedur Operasional (SOP)	Ada			

<b>Bidang Penguatan/ Instrumen Reformasi Birokrasi</b>		<b>Ada/ Belum Ada</b>	<b>Base Line 2021</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
b	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum Ada			
c	Keterbukaan Informasi Publik	Ada			
<b>5. Penguatan SDM</b>					
a	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Ada (update sesuai kebijakan)			
b	Pola Mutasi Internal	Belum Ada			
c	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Belum Ada			
d	Penetapan kinerja individu	Ada			
e	Penegakkan aturan disiplin / kode etika / kode perilaku pegawai	Ada			
<b>6. Penguatan Akuntabilitas</b>					
a	Keterlibatan pimpinan	Ada			
b	Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Ada			
<b>7. Penguatan Pengawasan</b>					
a	Pengendalian Gratifikasi	Belum Ada			

<b>Bidang Penguatan/ Instrumen Reformasi Birokrasi</b>		<b>Ada/ Belum Ada</b>	<b>Base Line 2021</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
b	Penerapan Sisten Pengendalian Intern Pmerintah (SPIP)	Belum Ada			
c	Pengaduan masyarakat	Ada (Perlu peningkatan media dan pengelolaanya)			
d	Whistle-Blowing System	Belum Ada			
e	Penanganan benturan kepentingan	Belum Ada			
<b>8. Penguatan Area Pelayanan Publik</b>					
a	Standar pelayanan	Ada			
b	Budaya pelayanan prima	Ada			
c	Pengelolaan pengaduan	Ada			
d	Penilaian keputusan terhadap pelayanan	Ada			
e	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Ada			
<b>9. QUICK WINS/ Unit Layanan Terpadu</b>		<b>Belum Ada</b>			

# **BAB** **5** Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

## **5.1 Target Kinerja**

Program-program yang direncanakan sebagai strategi pencapaian tujuan dan sasaran Politeknik Negeri Nunukan sebagaimana disebutkan dalam Bab II, akan diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021. Berikutnya akan dijabarkan sinkronisasi antara indikator tujuan dan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 9. Indikator Tujuan Politeknik Negeri Nunukan**

Kode	Indikator Tujuan	Baseline 2021	Target 2023	Target 2024
IKU 01	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	40%	55%	60%
IKU 02	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	-	-	10%
IKU 03	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	-	-	-
IKU 04	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.	-	17%	34%
IKU 05	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	-	35%	50%
IKU 06	Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional.	-	5,76	6,00
IKU 07	Realisasi pendapatan PNBPN.	-	1.415.000.000	1.485.750.000
IKU 08	Realisasi pendapatan PNBPN dari optimalisasi aset.	-	-	-

<b>Kode</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Baseline 2021</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Target 2024</b>
IKU 09	Prosentase penyelesaian modernisasi pengelolaan PNPB.	-	-	-
IKU 10	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB.	-	BB	BB
IKU 11	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.	-	94,5	95
IKU 12	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	-	10%	10%
IKU 13	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	-	40%	50%
IKU 14	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	-	0,10	0,20

**Tabel 10. Sinkronisasi Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja**

Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja		PIC
					2021	2023	2024	
IKU 01	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	1	Survei Kepuasan Mahasiswa	Persen	50	60	80	P4MP
		2	Survei Kepuasan Masyarakat dan Industri	Persen	-	80	90	Kemahasiswaan dan alumni
		3	Mahasiswa yang memperoleh beasiswa	Org	70	300	350	Kemahasiswaan
		4	Jumlah Mahasiswa Baru yang Diterima Karena Prestasi Olahraga dan Seni	Org	-	-	1	Akademik
		5	Mahasiswa yang diluluskan	Org	130	94	141	Akademik
		6	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi dalam negeri dalam satu tahun	Org	10	20	30	Kemahasiswaan dan prodi
		7	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi luar negeri dalam satu tahun	Org	-	-	5	Kemahasiswaan dan prodi
		8	Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja/bekerja satu tahun setelah lulus	Org	9	20	25	Kemahasiswaan dan prodi
		9	Jumlah lulusan yang terserap dengan berwirausaha satu tahun setelah lulus	Org	2	5	10	Kemahasiswaan dan prodi
		10	Jumlah mahasiswa yang lulus dan melanjutkan ke PT	Org	1	0	2	Kemahasiswaan dan prodi
		11	Hasil Karya Penelitian Terapan Mahasiswa (Berupa Produk)	Karya	0	1	2	Prodi

Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja		PIC
					2021	2023	2024	
		12	Hasil karya penelitian terapan mahasiswa yang dapat dihilirisasi ke pasar/masyarakat/industri	Karya		1	2	Prodi
		13	Jumlah mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Org	8	8	8	P3M dan Prodi
		14	Pabrik Wirausaha - Mahasiswa D4/D3/D2	Pabrik	-	-	1	P3M dan Prodi
		15	Penambahan buku Perpustakaan	buku	6.200	7.500	8.000	UPT Perpustakaan
		16	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Mhs	1000	1200	1300	UPT Perpustakaan
		17	Kurikulum Berbasis DU/DI yang sudah dilaksanakan di kampus	Kurikulum	4	4	4	Jurusan
IKU 02	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	1	Mahasiswa yang dimagangkan ke Perusahaan Luar Negeri	Org	-	-	2	Jurusan dan Kemahasiswaan
		2	Mahasiswa yang dimagangkan ke perusahaan dalam negeri	Org	100	120	130	Jurusan dan Kemahasiswaan
		3	Mahasiswa yang Magang bersertifikat kampus merdeka (microcredensial bermagang) Mahasiswa D4/D3/D2	Org	-	-	4	Jurusan dan Kemahasiswaan
		4	Mahasiswa mengikuti Studi Independent bersertifikat kampus merdeka (microcredensial non magang) Mahasiswa D4/D3/D2	Org	-	2	4	Jurusan dan Kemahasiswaan

Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja		PIC
					2021	2023	2024	
		5	Forum ajang kreatifitas mahasiswa yang dilaksanakan di kampus	Forum	-	1	2	Jurusan dan Kemahasiswaan
		6	Ajang kreatifitas mahasiswa yang diikuti di luar kampus	Ajang	-	2	4	Jurusan dan Kemahasiswaan
		7	Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)	Org	-	-	-	Jurusan dan Kemahasiswaan
		8	Kampus Mengajar Mahasiswa	Org	-	-	1	Akademik
		9	Berapa penghargaan/prestasi nasional yang dapat diperoleh dari aktifitas mahasiswa	Org	-	2	5	Kemahasiswaan
		10	Berapa penghargaan/prestasi internasional yang dapat diperoleh dari aktifitas mahasiswa	Org	-	-	1	Kemahasiswaan
		11	Jumlah mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus	Org		15	20	Jurusan
IKU 03	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	1	Akreditasi Lembaga	Akre ditasi	Belum Terakre ditasi	Ter akreditas i	Ter akreditas i	P4MP
		2	Jumlah Prodi yang Terakreditasi A	Prodi	0	0	0	Prodi dan P4MP
		3	Jumlah Prodi yang Terakreditasi B	Prodi	0	2	4	Prodi dan P4MP
		4	Jumlah Prodi D3 yang dimiliki	Prodi	0	4	4	Prodi
		5	Jumlah Prodi Sarjana Terapan yang dimiliki	Prodi	0	0	2	Prodi
		6	Jumlah Prodi yang Terakreditasi Internasional	Prodi	0	0	0	Prodi dan P4MP

Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja		PIC
					2021	2023	2024	
IKU 04	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>teambased project</i> ) sebagai bobot evaluasi.	1	Tenaga Kependidikan (Non Dosen) yang ditingkatkan kompetensinya	Org	0	2	9	Kepegawaian
		2	Dosen yang menerapkan metode pembelajaran PBL	Org		9	12	Prodi
		3	Prodi yg diusulkan dalam Upgrading D3 ke D4	Prodi			4	Prodi
		4	Program Sarjana Terapan yang diusulkan	Program			4	Prodi
		5	Produk yang telah dihilirkan oleh TEFA	Produk			1	
		6	Bahan ajar Manual (buku) yg diproduksi untuk pembelajaran	Buku	-	4	8	P3M
		7	Bahan ajar elektronik/ AVA yg diproduksi untuk pembelajaran	Bahan Ajar	-	1	2	P3M
		8	Pembelajaran bidang studi berbasis Digital/blended yg dilaksanakan	Pembelajaran	-	1	2	P3M
		9	Media pembelajaran yang dikembangkan untuk praktik pembelajaran	Media		2	5	Prodi
		10	Jumlah mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran <i>Project Based Learning</i> (PBL)	Mata Kuliah		10	16	Prodi
		11	Jumlah mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>Case Based Method</i> )	Mata Kuliah		15	20	Prodi
		12	Penambahan Laboratorium Baru	Laboratorium			2	Prodi
		13	Penambahan Sarana Prasarana Praktek	Rupiah		200 Juta	300 Juta	Prodi

Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja		PIC
					2021	2023	2024	
IKU 05	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	1	Jumlah Kerja Sama dengan Dunia Kerja (DU/DI) dalam negeri	PKS		10	20	P3M
		2	Jumlah Kerja Sama dengan Dunia Kerja (DU/DI) Luar negeri	PKS		1	2	P3M
		3	Praktisi dari DU/DI dalam negeri yang Mengajar di kampus	Org		4	8	P3M
		4	Praktisi dari DU/DI di luar negeri yang Mengajar di kampus	Org		1	2	P3M
IKU 06	Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional.	1	Daya Serap Anggaran Tahunan	Persen	-	95	98	Keuangan
		2	Capaian Serapan SBSN	Rupiah	-	-	-	Keuangan
IKU 07	Realisasi pendapatan PNBPN	1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rupiah	-	1,415 Milyar	1.485 Milyar	Keuangan
		2	Penerimaan hibah	Rupiah	-	-	100 Juta	Keuangan
		3	Penerimaan Mahasiswa	Org	0	200	250	Akademik
		4	Rencana Pengembangan Kampus		-	-	1	Perencanaan
		5	Peningkatan Jumlah Mahasiswa	Org	237	192	192	Akademik
		6	Hilirisasi produk terapan kampus	Produk		4	8	P3M
		7	Matching Fund yang diperoleh	Prodi		4	8	P3M
		8	Competitive Fund yang diperoleh	Prodi		1	2	P3M
		9	Usulan Prodi Baru	Prodi			2	Prodi
		10	Usulan Jurusan Baru Yang Diusulkan	Jurusan	0	0	0	Jurusan
IKU	Realisasi	1	Perluasan Bangunan	M2	3393	3393	3393	BMN

Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja		PIC
					2021	2023	2024	
08	pendapatan dari optimalisasi aset.	2	Tambahan tanah yang diperoleh dari berbagai pihak	M2	97260	97260	97260	BMN
IKU 09	Prosentase penyelesaian modernisasi	1	Jenis urusan manajemen kampus berbasis digital	Urusan	0	2	3	TIK
IKU 10	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	Perencanaan
		2	Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di kampus	Tim	-	1	2	Kepegawaian
		3	Target Keindahan, Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Kenyamanan di kampus	Predikat	-	-	-	Umum
		4	Penghargaan yang diraih Tingkat Internasional	Penghargaan	-	-	1	Umum
		5	Penghargaan yang diraih Tingkat Nasional	Penghargaan	-	-	1	Umum
		6	Nilai score SINDE dari Biro Umum Kemdikbudristek	Score	-	100	100	Umum
		7	Publikasi pemberitaan/sosialisasi yang dilaksanakan secara digital	Publikasi	0	10	15	Umum
		8	Publikasi pemberitaan/sosialisasi yang dilaksanakan secara konvensional	Publikasi	3	4	6	Umum
		9	Jumlah dan jenis media informasi dan publikasi	Jenis Media	4	5	6	Umum dan TIK
		10	Jumlah Follower pada Akun Sosial Media	Follower	0	2.000	3000	TIK
		11	Jumlah Subscriber pada Akun Youtube Official	Subscriber	0	50.000	60000	TIK

Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja		PIC
					2021	2023	2024	
		12	Jumlah Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Daya Tank Kampus	Upaya	4	5	6	Umum
		13	Pembentukan Tim Humas	Tim	3	3	3	Umum
		14	Berapa penghargaan nasional yang dapat diperoleh dari aktifitas Tenaga Kependidikan	Penghargaan	-	-	-	Kepegawaian
		15	Berapa penghargaan internasional yang dapat diperoleh dari aktifitas Tenaga Kependidikan	Penghargaan	-	-	-	Kepegawaian
		16	Jumlah Prodi D1/D2 yang dimiliki	Prodi	0	0	0	Prodi
IKU 11	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.	1	Nilai IKPA (indikator kinerja pelaksanaan anggaran) dari Kemenkeu	Nilai	0	93	94	Keuangan
		2	Nilai EKA (evaluasi kinerja anggaran)	Nilai				Keuangan
		3	Target Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih WBBM	Kesiapan	-	40	50	Umum
		4	Penyelesaian temuan Inspektorat Kemdikbudristek	Temuan	0	0	0	Keuangan
		5	Penyelesaian temuan BPK-RI	Temuan	0	0	0	Keuangan
		6	Target menjadi BLU/PTNBH	BLU/PTNBH	-	-	-	Perencanaan
		7	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program D2 Fast Track	Org				Prodi
		8	Program D2 Fast Track yang terbentuk	Program	-	-	-	Prodi
		9	Prodi yg diusulkan dalam program D2 Fast Track yang sudah berdiri	Prodi	-	-	-	Prodi
IKU	Persentase dosen	1	Jumlah dosen tetap	Org	-	28	30	Kepegawaian

Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja		PIC
					2021	2023	2024	
12	yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	2	Jumlah dosen P3K	Org	-	2	16	Kepegawaian
		3	Jumlah dosen berkualifikasi S2 Dalam Negeri	Org	-	25	30	Kepegawaian
		4	Jumlah dosen berkualifikasi S2 Luar Negeri	Org	-	-	-	Kepegawaian
		5	Jumlah dosen yg sedang tugas/izin belajar Program Master	Org	-	2	3	Kepegawaian
		6	Jumlah dosen yang naik pangkat dan golongan	Org	-	-	10	Kepegawaian
		7	Jumlah Guru Besar	Org	-	-	-	Kepegawaian
		8	Jumlah Lektor Kepala	Org	-	1	1	Kepegawaian
		9	Jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain (nasional)	Org	-	1	2	P3M
		10	Jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus QS 100 berdasarkan bidang ilmu	Org	-	-	-	P3M
		11	Jumlah dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir	Org	-	4	8	P3M
		12	Jumlah dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi tingkat internasional dalam 5 tahun terakhir	Org	-	4	8	P3M
		IKU 13	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat	1	Jumlah dosen dari PT lain/tidak tetap	Org	-	5
2	Jumlah dosen berkualifikasi S3 Dalam Negeri			Org	-	1	2	Kepegawaian
3	Jumlah dosen berkualifikasi S3 Luar			Org	-	1	2	Kepegawaian

Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja		PIC
					2021	2023	2024	
	kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.		Negeri					
		4	Jumlah dosen yang mengikuti Program Doctoral	Org	-	-	-	Kepegawaian
		5	Jumlah dosen yang mengikuti program Post Doctoral	Org	-	-	-	Kepegawaian
		6	Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan/workshop/seminar/konferensi ke PT Lain di dalam negeri	Org	-	4	8	P3M dan Prodi
		7	Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan/workshop/seminar/konferensi ke PT Lain di luar negeri	Org	-	4	8	P3M dan Prodi
		8	Jumlah dosen yg Magang ke Industri dalam negeri	Org	-	4	8	P3M dan Prodi
		9	Jumlah dosen yang mengikuti short course di luar negeri	Org	-	4	8	P3M dan Prodi
		10	Dosen yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi dosen di Luar Negeri	Org	-	4	8	P3M dan Prodi
		11	Bridging course bagi dosen	Org	-	4	8	P3M dan Prodi
		12	Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi dosen (serdos)	Org	-	3	4	Kepegawaian
		13	Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di DUDI	Org			2	Prodi
		14	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi dari/diakui oleh DUDI	Org	-	-	2	Prodi

Kode	Indikator Kinerja Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja		PIC
					2021	2023	2024	
		15	Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional	Org	-	-	2	Prodi
		17	Usulan Magister terapan	Usulan	-	-	-	Jurusan
IKU 14	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1	Dosen yg memperoleh hibah bersaing penelitian dari berbagai sumber	Org	-	4	8	P3M
		2	Hasil penelitian terapan Dosen yang dipublikasikan	Penelitian	15	20	20	P3M
		3	Hasil penelitian terapan Dosen yang dihilirasi ke pasar/industri/masyarakat	Penelitian		8	16	P3M
		4	HAKI/paten yang diperoleh	HaKI		10	15	P3M
		5	Jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan berhasil mendapat rekognisi nasional	Org		4	8	P3M
		6	Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan	Pengabdian	11	20	25	P3M

## 5.2 Kerangka Pendanaan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Negeri vokasi, PNN menerima pendapatan dari beberapa sumber, antara lain adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, dan Pendapatan Usaha Lainnya. Sumber pendapatan PNN tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari APBN, yaitu pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang tertuang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) setiap tahunnya, disebut dengan Pendapatan Rupiah Murni yang terdiri dari Rupiah Murni Mengikat dan Rupiah Murni Tidak Mengikat;
2. Pendapatan Jasa Layanan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pungutan kepada mahasiswa dengan jenis pungutan:
  - a. Uang Kuliah Tetap/UKT yang dipungut setiap semester;
  - b. Biaya Seleksi Ujian Masuk Politeknik;
  - c. Biaya Wisuda (dipungut satu kali selama studi);
  - d. Diklatsar MABA (dipungut sekali selama studi);
  - e. Biaya Kelengkapan Mahasiswa Baru (dipungut sekali selama studi);

## 5.3 Proyeksi Pendapatan

Rencana Strategis Politeknik Negeri Nunukan sudah menetapkan Indikator Kinerja pada setiap Program. Indikator-indikator tersebut kemudian dijadikan target kinerja semua unit kerja yang ada. Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut, seluruh unit kerja akan menyusun program dan kegiatan tahunan dengan terlebih dahulu merencanakan kebutuhan anggaran agar kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dalam rangka pencapaian target indikator kinerja. Rekapitulasi seluruh kebutuhan anggaran lembaga yang merupakan gabungan dari kebutuhan anggaran seluruh unit kerja diusulkan kepada

Kementerian Keuangan untuk mendapat persetujuan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jenis pendapatan Politeknik Negeri Nunukan dikelompokkan dalam dua sumber dengan rincian masing-masing sumber sebagai berikut:

- a. Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan anggaran yang bersumber dari :
  1. Alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS).
  2. Alokasi anggaran untuk operasional kantor.
  3. Alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
  4. Sumber lain termasuk pengadaan sarana prasarana kampus (SBSN).
- b. Pendapatan dan Non APBN, merupakan anggaran yang bersumber dari :
  1. Pendapatan biaya pendidikan.
  2. Pendapatan dari optimalisasi asset.
  3. Pendapatan dari jasa perbankan.
  4. Pendapatan dari kerja sama industri.
  5. Pendapatan dari hibah/penugasan.

Tabel dibawah ini menyajikan proyeksi pendapatan Politeknik Negeri Nunukan yang bersumber dari APBN dan Non APBN

**Tabel 11. Proyeksi Penerimaan**

No.	Jenis Pendapatan	Base Line 2021	Proyeksi (Rp)		
			2022	2023	2024
1	APBN				
	a. Gaji dan Tunjangan	-	1.128.070.000	1.173.538.000	1.842.990.000
	b. Operasional Kantor	-	7.705.648.000	8.080.891.000	8.600.000.000
	c. SBSN	-	8.833.718.000	9.254.429.000	10.442.990.000
2	Non APBN				
	a. Pendapatan Biaya Pendidikan	-	1.132.950.000	1.415.000.000	1.485.750.000
	b. Pendapatan dari Optimalisasi Aset	-	-	-	-
	c. Pendapatan dari Jasa Perbankan	-	-	-	-
	Pendapatan dari Kerja sama Industri	-	-	-	-
	e. Pendapatan dari Hibah/Penugasan	-	-	-	-
<b>Total Proyeksi Penerimaan</b>		-	<b>9.966.668.000</b>	<b>10.669.429.000</b>	<b>11.928.740.000</b>

## 5.4 Proyeksi Belanja

Proyeksi kebutuhan belanja tiap unit kerja dan lembaga telah disusun satu tahun sebelumnya dan telah ditetapkan melalui rapat kerja yang diselenggarakan dalam rangka penentuan alokasi belanja pada tahun depan. Dalam menentukan proyeksi belanja tahun depan, telah melalui tahapan-tahapan yaitu:

- a. Membandingkan alokasi dan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
- b. Melalui pembahasan dan koordinasi pada tiap bidang, sehingga output kegiatan yang dihasilkan tidak akan menyimpang dari target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.
- c. Melalui reviu substansi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk memastikan keterkaitan output kegiatan dengan target indikator kinerja yang akan dicapai.
- d. Melalui reviu anggaran yang dilakukan oleh bagian keuangan untuk memastikan rencana anggaran dan biaya yang diusulkan tidak menyimpang dari satuan biaya internal yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran.

Pada tabel dibawah ini disajikan proyeksi belanja Politeknik Negeri Nunukan yang merupakan rekapitulasi proyeksi belanja pada seluruh unit kerja dan lembaga

**Tabel 12. Proyeksi Belanja**

No	Jenis Pendapatan	Base Line 2021	Proyeksi (Rp)		
			2022	2023	2024
1	Realisasi Belanja Rupiah Murni (APBN)				
	a. Belanja Pegawai	-	1.128.070.000	1.173.538.000	1.842.990.000
	b. Belanja Barang	6.501.225.000	7.344.439.000	7.880.891.000	8.100.000.000
	c. Belanja Modal	498.775.000	361.209.000	200.000.000	500.000.000
		7.000.000.000	8.833.718.000	9.254.429.000	10.442.990.000
2	Realisasi Belanja PNBPN				
	a. Belanja Pegawai	-	-	-	-
	b. Belanja Barang	736.000.000	1.121.630.000	1.228.448.000	1.470.892.500
	c. Belanja Modal	-	-	172.500.000	-
		736.000.000	1.121.630.000	1.400.948.000	1.470.892.500
<b>Total Proyeksi Penerimaan</b>		<b>7.736.000.000</b>	<b>9.955.348.000</b>	<b>10.655.377.000</b>	<b>11.913.882.500</b>

## BAB

# 6 Penutup

### 6.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Nunukan tahun 2020 - 2024 ini adalah sistem rencana pengembangan jangka menengah (RPJM) dengan rentang waktu lima tahunan dan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan pengembangan jangka panjang (RPJP) Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020 - 2050. Penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 - 2024.

Harmonisasi ini diwujudkan menjadi Renstra Politeknik Negeri Nunukan Perubahan yang menggantikan Renstra tahun 2020-2024 dengan tidak mengubah nama. Penyusunan ini dimaksudkan agar terjadi kesinambungan program kerja Politeknik Negeri Nunukan dengan kondisi-kondisi perubahan yang terjadi.

Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud diatas, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai perencanaan dan peganggaran tahunan sudah harus diajukan setahun sebelum tahun berjalan, sehingga untuk RKAT tahun 2023 dan 2024 dapat tetap mengacu pada Renstra Politeknik Negeri Nunukan ini yang berlaku sampai tahun 2024. Dengan demikian Renstra Perubahan Politeknik Negeri Nunukan tahun 2020-2024 ini dapat menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan program kegiatan universitas dan memastikan, bahwa pada akhir periodisasi dari

dokumen renstra bisnis ini tidak akan terjadi kekosongan regulasi.

## 6.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Perubahan Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020-2024 dijadikan sebagai landasan oleh Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan Politeknik dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pengembangan empat tahunan dan rencana pengembangan duapuluh tahunan.

Berkaitan dengan itu, maka dalam Rencana Strategis Perubahan Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020-2024 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

- a. Direktur dan jajaran pimpinan di tingkat politeknik dan jurusan serta unit-unit di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Politeknik Negeri Nunukan ini dengan penuh tanggung jawab;
- b. Direktur dan Wakil Direktur, dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan program kegiatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan sesuai dengan dokumen Renstra Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020-2024;
- c. Untuk menjamin agar Key Performance Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja (IK) setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya para Wakil Direktur berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020-2024;
- d. Setiap Jurusan dan UPT di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan berkewajiban untuk menjabarkan Renstra Politeknik Negeri

Nunukan Tahun 2020-2024 ke dalam dokumen perencanaan masing-masing dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun;

- e. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam Rencana Strategi Perubahan Politeknik Negeri Nunukan 2020-2024, Direktur dan para Wakil Direktur berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Jurusan dan UPT dalam perumusan rencana kerja masing-masing;
- f. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Politeknik Negeri Nunukan 2020-2024, Direktur wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana dan pelaksanaannya dengan dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Politeknik Negeri Nunukan;

Dalam hal target capaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Politeknik Negeri Nunukan ini tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala yang bersifat eksternal, maka dokumen Renstra Perubahan Politeknik Negeri Nunukan ini dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama PTN Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 3 Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data
IKU 01	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapatkan pekerjaan b. melanjutkan studi, atau c. menjadi wiraswasta	<p><b>a. Kriteria pekerjaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya;</li> <li>b) organisasi nirlaba;</li> <li>c) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>d) lembaga pemerintah; atau</li> <li>e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau</li> </ol> </li> <li>2) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (part-time) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas.</li> </ol> <p><b>b. Kriteria kelanjutan studi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</li> <li>2) PTN Vokasi Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</li> <li>3) PTN Seni Budaya Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran diprogram studi S2/S2 terapan atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah</li> </ol>	$A = \frac{n}{t} \times 100$ <p>n : lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta t : total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2</p> <p>Dokumen pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Tracer Study yang telah ditandatangani pimpinan</li> <li>2. Daftar mahasiswa lulusan T-1, minimal dilengkapi dengan nama, NIM, jenjang, prodi, fakultas, dan nomor ijazah (file excel)</li> <li>3. Daftar mahasiswa lulusan T-1 yang mengisi Tracer Study , minimal dilengkapi dengan nama, NIM, jenjang, prodi, fakultas, nomor ijazah, masa tunggu, nama perusahaan/nama usaha/bidang usaha, provinsi lokasi perusahaan/tempat usaha, nilai gaji/pendapatan, tempat melanjutkan studi (file excel)</li> <li>4. Kuesioner Tracer Study</li> </ol>	<p>data tracer study</p> <p>PIC =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Wakil Direktur 1</li> <li>-Wakil Direktur 2</li> <li>-Tim Job Placement Center (UPC)</li> <li>-Admin masing-masing Prodi</li> </ul>

		<p>lulus.</p> <p><b>c. Kriteria kewiraswastaan:</b></p> <p>1) PTN Akademik dan PTN Vokasi:</p> <p>a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan; atau</li> <li>• pekerja lepas (freelancer), atau</li> </ul> <p>b) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.</p> <p>2) PTN Seni Budaya:</p> <p>a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (contoh: membuka sanggar); atau</li> <li>• pekerja lepas (freelancer) yang menghasilkan karya seni dan budaya, atau</li> </ul> <p>b) sudah berpenghasilan sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.</p>		
IKU 02	<p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang:</p> <p>a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus, atau</p> <p>b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional</p>	<p><b>a. Pengalaman di luar kampus:</b></p> <p>Mahasiswa yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <p>1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.</p> <p>2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar:</p>	$A = \frac{n}{t} \times 100$ <p>n : jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional</p> <p>t : total jumlah mahasiswa</p> <p>Dokumen pendukung</p> <p>1. Daftar mahasiswa yang mengikuti kegiatan merdeka belajar, minimal dilengkapi dengan nama, NIM, prodi, fakultas, program/kegiatan merdeka belajar, jumlah SKS yang diakui, dan dosen pembimbing (file excel)</p>	<p>Data diperoleh dari Data UKM Kewirausahaan PNN, Data Capaian Kegiatan Mahasiswa dari Wakil Direktur 2 bidang kemahasiswaan dan kerjasama, Data Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) PNN</p> <p><b>PIC =</b></p>

		<p>Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah.</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</p> <p><b>b. Kriteria prestasi</b> Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p>	<p>2. SK Rektor/Pejabat di PTN yang memuat daftar mahasiswa yang mengikuti merdeka belajar (soft file)</p> <p>3. Surat Keterangan/paduan kegiatan (disahkan Pejabat di PTN) yang menerangkan program/kegiatan merdeka belajar dan sks yang diakui (soft file)</p> <p>4. Data dukung lain untuk masing-masing kegiatan jika tidak ada Surat Keterangan/panduan kegiatan, seperti MoU, laporan kegiatan, surat bukti magang, surat keterangan dari tempat kegiatan, bukti penelitian, dan lain-lain (soft file)</p> <p>5. Data jumlah mahasiswa S1/D4/D3/D2 per fakultas (dalam file excel)</p> <p>6. Data mahasiswa yang meraih prestasi, minimal dilengkapi dengan nama, NIM, prodi, fakultas, nama kompetisi/lomba, tingkat kompetisi/lomba, penyelenggara, prestasi, dan dosen pembimbing (file excel)</p> <p>7. Sertifikat/piagam prestasi atau bukti lain yang menunjukkan prestasi tersebut (soft copy)</p>	<p>- Wakil Direktur 1 bidang Akademik dan Penjaminan Mutu</p> <p>- Wakil Direktur 2 bidang kemahasiswaan dan kerjasama PNN</p> <p>- Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)</p>
IKU 03	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	<p>Kriteria Akreditasi:</p> <p>a. <b>Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</b> dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau</p> <p>a. <b>Lembaga akreditasi internasional lainnya:</b></p> <p>1) British Accreditation Council (BAC);</p> <p>2) The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC);</p> <p>3) The Quality Assurance Agency (QAA);</p> <p>4) The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)</p>	$A = \frac{n}{x + y} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.</p> <p>x = jumlah program studi S1.</p> <p>y = jumlah program studi D4/D3/D2.</p>	<p>Data, Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu dengan dibantu P4MP dan semua Ketua Jurusan di PNN.</p> <p>PIC =</p> <p>- Wakil Direktur 1</p> <p>- Tim P4MP</p>

		<p>International);</p> <p>5) Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET);</p> <p>6) Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE);</p> <p>7) Hong Kong Council for Accreditation of Academic &amp; Vocational Qualifications (HKCAAVQ);</p> <p>8) Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT);</p> <p>9) Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA);</p> <p>10) The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB);</p> <p>11) The Association of MBAs (AMBA);</p> <p>12) EFMD Quality Improvement System (EQUIS);</p> <p>13) International Accreditation Council for Business Education (IACBE);</p> <p>14) Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS);</p> <p>15) Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP);</p> <p>16) Royal Society of Chemistry (RSC);</p> <p>17) The Rehabilitation Council of India (RCI); atau</p> <p>18) Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)</p> <p>Khusus untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya: akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional.</p>	<p>Dokumen Pendukung</p> <p>1. Daftar program studi, minimal dilengkapi dengan nama prodi, jenjang studi, fakultas, status keaktifan, akreditasi internasional, lembaga akreditasi internasional, tautan sertifikat akreditasi (file excel)</p> <p>2. Sertifikat akreditasi internasional (soft copy)</p>	
IKU 04	<p>Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bobot evaluasi.</p>	<p>a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project).</p> <p>1) <b>Pemecahan kasus (case method):</b></p> <p>a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;</p> <p>b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan</p> <p>c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</p> <p>2) <b>Pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project):</b></p> <p>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</p> <p>b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau</p>	$A = \frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi</p> <p>t = total jumlah mata kuliah</p> <p>Dokumen Pendukung</p> <p>1. Daftar seluruh mata kuliah, minimal dilengkapi dengan nama mata kuliah, jumlah sks, prodi, jenjang studi, jenis mata kuliah (kelas/lab), jenis pembelajaran (case method/team based project), formula penilaian,</p>	<p>Data Diperoleh dari matakuliah yang menggunakan metode pemecahan kasus (case method) ditambah pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project)</p> <p>PIC =</p> <p>- Wakil Direktur 1</p> <p>- Tim P4MP</p>

		<p>pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</p> <p>c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan</p> <p>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.</p> <p>Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project).</p>	<p>tautan RPS, tautan laporan (file excel)</p> <p>2. Rencana Pembelajaran Semester - RPS (soft copy)</p> <p>3. Laporan/hasil pembelajaran case method/team based project mahasiswa - 1 laporan/hasil per mata kuliah (soft copy)</p>	
IKU 05	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	<p>a. Kriteria Kemitraan</p> <p>Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:</p> <p>1) <b>Untuk PTN Akademik:</b></p> <p>a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan</p> <p>b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p> <p>2) <b>Untuk PTN Vokasi:</b></p> <p>a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);</p> <p>b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;</p> <p>c) menyediakan kesempatan kerja; dan</p> <p>d) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.</p> <p>3) <b>Untuk PTN Seni Budaya:</b></p> <p>a) pengembangan kurikulum bersama merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan</p> <p>b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p> <p>b. Kriteria mitra:</p> <p>1) perusahaan multinasional;</p>	$A = \frac{n}{x + y} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra</p> <p>x = jumlah program studi S1</p> <p>y = jumlah program studi D4/D3/D2</p> <p>Dokumen Pendukung</p> <p>1. Daftar prodi, minimal dilengkapi dengan jenjang, fakultas, status keaktifan, bentuk kerja sama, kriteria mitra, nama mitra, periode kerja sama, dan tautan MoU (file excel)</p> <p>2. MoU dan keluaran kemitraan (soft copy)</p>	<p>Data Diperoleh dari dokumen MoU dan Dokumen PKS sebagai turunannya, Data Badan kerja sama PNN</p> <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja</p> <p>x = jumlah program studi S1</p> <p>y = jumlah program studi D4/D3/D2</p> <p>PIC =</p> <p>- Wakil Direktur 2</p> <p>- Keja Sama Perguruan Tinggi (KPT) PNN</p>

		<p>2) perusahaan nasional berstandar tinggi;  3) perusahaan teknologi global;  4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;  5) organisasi nirlaba kelas dunia;  6) institusi/organisasi multilateral;  7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject);  8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);  9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;  10) rumah sakit;  11) UMKM; atau</p> <p>b. lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional</p>		
IKU 06	Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional.	<p><b>Penerimaan negara bukan pajak (PNBP)</b> adalah pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> <p><b>Biaya Operasional</b> merupakan seluruh biaya yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi Belanja Pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh PNBPN, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN maupun</p> <p>c. Pendapatan PNBPN</p>	<p>Formula Perhitungan Realisasi IKU</p> $\frac{\text{Pendapatan PNBPN}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$ <p>Formula Perhitungan Capaian IKU</p> $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	Data Diperoleh dari dokumen BMN
IKU 07	Realisasi pendapatan PNBPN	d. Penerimaan ini diperoleh dengan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN), seperti aset hingga sewa tanah dan bangunan		Data Diperoleh dari dokumen BMN
IKU 08	Realisasi pendapatan PNBPN dari optimalisasi aset	<p>Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset pada PNBPN (aset tetap maupun lancar) meliputi pelaksanaan pengelolaan aset PNBPN dan pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aset Tetap dan Aset Lainnya</b> → KSO, KSM (selain Kerja sama dari Kementerian Teknis) ]</li> <li>• <b>Aset Lancar</b> → return dari aktivitas investasi jangka pendek, dan jasa layanan perbankan.</li> </ul>	<p>Formula Perhitungan Realisasi IKU</p> <p>Realisasi = Pendapatan PNBPN dari Pengelolaan Aset</p> <p>Formula Perhitungan Capaian IKU</p> $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	Data Diperoleh dari dokumen BMN dan Keuangan
IKU 09	Prosentase penyelesaian modernisasi pengelolaan	Pengukuran tingkat modernisasi pengelolaan PNBPN dalam mendukung peningkatan layanan serta peningkatan akuntabilitas dan akurasi manajemen	Formula Perhitungan Realisasi IKU	Data Diperoleh dari dokumen Keuangan

	PNBP	dalam pengambilan keputusan;	setiap tahapan modernisasi PNBP.  Formula Perhitungan Capaian IKU $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	
IKU 10	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Sesuai <b>Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021</b> tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), berikut <b>Komponen dan Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja:</b> <b>a. Komponen Perencanaan Kinerja (30)</b> terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (6) - Sub-Komponen 2 Kualitas (9) - Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15) <b>b. Komponen Pengukuran Kinerja (30)</b> terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (6) - Sub-Komponen 2 Kualitas (9) - Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15)	<b>a. Komponen Pelaporan Kinerja (15)</b> terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (3) - Sub-Komponen 2 Kualitas (4,5) - Sub-Komponen Pemanfaatan (7,5)  <b>b. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)</b> terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (5) - Sub-Komponen 2 Kualitas (7,5) Sub-Komponen Pemanfaatan (12,5)	Data akan diperoleh dari Lembar Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Biro Perencanaan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.
IKU 11	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.	<b>Nilai Kinerja Anggaran = [60% x Nilai EKA] + [40% x Nilai IKPA]</b>  <b>Nilai EKA</b> diambil dari aplikasi SMART DJA <b>Nilai IKPA</b> diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).	Data akan diperoleh dari formulasi perhitungan NKA yang tersaji di Spasikita (Terintegrasi dengan Smart DJA)
IKU 12	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di	<b>a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi</b> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi,		Data Diperoleh dari Tim Pusat

<p>kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>	<p>minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);</li> <li>3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan</li> <li>4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.</li> </ol> <p><b>b. Kriteria Perguruan Tinggi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); atau</li> <li>2) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.</li> </ol> <p><b>c. Kriteria Kegiatan:</b></p> <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.</li> <li>2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.</li> <li>3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.</li> </ol> <p><b>d. Kriteria Pengalaman Praktisi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan multinasional;</li> <li>b) perusahaan swasta nasional;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;</li> <li>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>f) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>g) lembaga pemerintah; atau</li> </ol> </li> </ol>	$A = \frac{n}{x + y} \times 100$ <p>n : jumlah dosen tetap (tidak termasuk CPNS) yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridharma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>x : jumlah dosen tetap (tidak termasuk CPNS) dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)</p> <p>y : jumlah dosen tetap (tidak termasuk CPNS) dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)</p> <p>Dokumen pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar dosen, minimal dilengkapi dengan nama, tanggal lahir, NIDN/NIDK, status kepegawaian (tetap/tidak tetap), prodi mengajar, status keaktifan, jenjang pendidikan terakhir, dan informasi pendidikan terakhir - perguruan tinggi dan bidang ilmu (file excel)</li> <li>2. Daftar dosen yang dalam periode 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2021, minimal dilengkapi dengan jenis kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject), nama mahasiswa, nama kompetisi, tingkat kompetisi, tempat kegiatan tridharma/praktisi di</li> </ol>	<p>Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) PNN</p> <p>PIC =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Direktur 1</li> <li>- Tim SAKIP</li> <li>- Unit P4MP</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>h) BUMN/BUMD.</p> <p>2) Untuk PTN Seni Budaya: Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:</p> <p>a) menjadi pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (contoh: membuka sanggar);</p> <p>b) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau</p> <p>c) menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</p> <p><b>e. Kriteria prestasi</b> Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p>	<p>dunia industri, tahun kegiatan/kompetisi, dan tautan data dukung (file excel)</p> <p>3. Kontrak/Surat Keputusan antara perguruan tinggi asal dengan organisasi luar kampus (soft copy)</p> <p>4. Surat Keterangan dari perguruan tinggi yang memuat nama mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dan nama dosen pembimbing (soft copy)</p>	
IKU 13	<p>Persentase dosen tetap:</p> <p>a. berkualifikasi akademik S3</p> <p>b. memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau</p> <p>c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja</p>	<p><b>a. Kualifikasi Akademik S3</b> Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi.</p> <p><b>b. Lembaga kompetensi</b></p> <p>1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;</p> <p>2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;</p> <p>4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau</p> <p>5) Sertifikasi dari perusahaan BUMN.</p> <p><b>c. Berpengalaman Praktisi</b></p> <p>1) Untuk PTN Akademik Berpengalaman kerja di:</p> <p>a) perusahaan multinasional;</p> <p>b) perusahaan swasta nasional;</p> <p>c) perusahaan teknologi global;</p> <p>d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;</p> <p>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</p> <p>f) institusi/organisasi multilateral;</p> <p>g) lembaga pemerintah; atau</p> <p>h) BUMN/BUMD.</p> <p>2) Untuk PTN Vokasi Pengalaman kerja yang relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di:</p> <p>a) perusahaan multinasional;</p>	$A = \frac{n}{x + y} \times 100$ <p>n : jumlah dosen tetap (tidak termasuk CPNS) yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi.</p> <p>x : jumlah dosen tetap (tidak termasuk CPNS) dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)</p> <p>y : jumlah dosen tetap (tidak termasuk CPNS) dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)</p> <p>Dokumen pendukung:</p> <p>1. Daftar dosen yang berisi nama dosen, tanggal lahir, NIDN/NIDK, status kepegawaian (tetap/tidak tetap), prodi mengajar, status keaktifan, jenjang pendidikan terakhir, informasi pendidikan terakhir (perguruan tinggi, bidang ilmu, dan tahun lulus), jenis sertifikat, pengalaman praktisi, link sertifikat/surat keterangan/dokumen pendukung (file excel)</p>	<p>Data Diperoleh dari SIMPEG, SISTER, PDDIKTI</p> <p>PIC =</p> <p>- Wadir I</p> <p>- Tim SAKIP</p> <p>- Bagian Kepegawaian PNN</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) perusahaan swasta nasional;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (startup) teknologi;</li> <li>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>f) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>g) lembaga pemerintah;</li> <li>h) BUMN/BUMD;</li> <li>i) perusahaan swasta sebagai pendiri atau pasangan pendiri (co-founder); atau</li> <li>j) dunia industri sebagai pekerja lepas (freelancer) yang terbukti produktif.</li> </ul> <p>3) Untuk PTN Seni Budaya Kriteria sama dengan PTN Akademik dengan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau</li> <li>b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</li> </ul>	<p>2. Sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja (soft copy)</p> <p>3. Dokumen yang menunjukkan pengalaman kerja tempat sesuai kriteria (soft copy)</p>	
IKU 14	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	<p>Kategori luaran:</p> <p>a. <b>Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</b></p> <p>1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik.</p> <p><b>Kriteria Rekognisi Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional);</li> <li>• Karya ilmiah/buah pemikiran didesiminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau</li> <li>• Karya ilmiah/buah pemikiran didesiminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional.</li> </ul> <p><b>Kriteria Penerapan di masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ide di dalam jurnal buku, atau bab (chapter) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan;</li> <li>• Penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain;</li> <li>• Hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau</li> <li>• Buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional</li> </ul> <p>2) Karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus.</p> <p><b>Kriteria Rekognisi Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipublikasikan oleh penerbit internasional;</li> </ul>	$A = \frac{n}{x + y} \times 100$ <p>n : jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah.</p> <p>x : jumlah dosen tetap (tidak termasuk CPNS) dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)</p> <p>y : jumlah dosen tetap (tidak termasuk CPNS) dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)</p> <p>Dokumen Pendukung</p> <p>1. Daftar dosen, minimal dilengkapi dengan nama, tanggal lahir, NIDN/NIDK, status kepegawaian (tetap/tidak tetap), prodi mengajar, status keaktifan, jenjang pendidikan terakhir, informasi pendidikan terakhir</p>	<p>Data Diperoleh dari Rekapitulasi Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dan Tim Hki PNN</p> <p>PIC =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Direktur 1</li> <li>- Tim P3M</li> <li>- Tim Hki PNN</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional;</li> <li>• disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau</li> <li>• terlibat dalam penyusunan buku saku (handbook) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.</li> </ul> <p><b>Kriteria Penerapan di masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku saku (handbook), buku teks (textbook, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.</li> </ul> <p>3) Studi kasus</p> <p><b>Kriteria Rekognisi Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri</li> </ul> <p><b>Kriteria Penerapan di masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi kasus digunakan sebagai pembelajaran pemecahan studi kasus (case method) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.</li> </ul> <p>4) Laporan penelitian untuk mitra</p> <p><b>Kriteria Rekognisi Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.</li> </ul> <p><b>Kriteria Penerapan di Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral</li> </ul> <p><b>b. Karya terapan, terdiri atas:</b></p> <p>1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)</p> <p><b>Kriteria Rekognisi Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapat penghargaan internasional</li> <li>• Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala internasional; atau</li> <li>• Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional</li> </ul> <p><b>Kriteria Penerapan di Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperoleh paten nasional;</li> <li>• Pengakuan asosiasi;</li> <li>• Dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/non</li> </ul>	<p>- perguruan tinggi dan bidang ilmu (file excel)</p> <p>2. Daftar karya ilmiah, minimal dilengkapi dengan jenis karya, tautan ke database jurnal, tautan sertifikat seminar/konferensi, tautan tangkapan layar terbitan artikel ilmiah pada media internasional, jumlah sitasi, tautan laporan hasil pembelajaran case study, tautan laporan penelitian, atau tautan MoU (file excel)</p> <p>3. Daftar karya terapan, minimal dilengkapi dengan jenis karya, tautan penghargaan internasional, nomor hak paten, tautan sertifikat dari lembaga asosiasi, atau tautan MoU kemitraan (file excel)</p> <p>4. Daftar karya seni, minimal dilengkapi dengan jenis karya, tautan MoU, tautan katalog pameran, tautan sertifikat festival/pameran/penghargaan, atau tautan sertifikat/bukti lolos kurasi (file excel)</p> <p>5. Sertifikat, MoU, dan/atau dokumen pendukung lain (soft copy)</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>pemerintah; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala nasional.</li> </ul> <p>2) Pengembangan invensi dengan mitra</p> <p><b>Kriteria Rekognisi Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karya dikembangkan bersama mitra internasional atau multinasional.</li> </ul> <p><b>Kriteria Penerapan di Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.</li> </ul> <p>c. <b>Karya seni, terdiri dari:</b></p> <p>1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance)</p> <p>Kriteria Rekognisi Internasional</p> <p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;</li> <li>• tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</li> <li>• ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau</li> <li>• mendapat penghargaan berskala internasional. Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</li> <li>• dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah;</li> <li>• dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional;</li> <li>• lolos kurasi pihak ketiga;</li> <li>• metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau</li> <li>• diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.</li> </ul> <p>2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya</p> <p><b>Kriteria Rekognisi Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</li> <li>• karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau</li> </ul>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• karya mendapat penghargaan berskala internasional</li> </ul> <p><b>Kriteria Penerapan di Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koleksi karya asli;</li> <li>• dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lolos kurasi pihak ketiga;</li> </ul> </li> <li>• metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau</li> <li>• karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.</li> </ul> <p>3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi music</p> <p><b>Kriteria Rekognisi Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karya mendapat penghargaan (award, shortlisting, prizes) berskala internasional;</li> <li>• karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau</li> <li>• karya ditinjau/direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional.</li> </ul> <p><b>Kriteria Penerapan di Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karya asli;</li> <li>• karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional</li> <li>• karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau</li> <li>• karya dibiayai oleh industri atau pemerintah. tri atau pemerintah.</li> </ul> <p>4) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah</p> <p><b>Kriteria Rekognisi Internasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasin nonpemerintah internasional;</li> <li>• karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</li> <li>• karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau</li> <li>• karya mendapat penghargaan berskala internasional.</li> </ul> <p><b>Kriteria Penerapan di Masyarakat</b></p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

---

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah;</li><li>• dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional;</li><li>• lolos kurasi pihak ketiga; atau</li><li>• karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.</li></ul>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--